



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



G20

INDONESIA

2022 RECOVER TOGETHER
RECOVER STRONGER



NEWSLETTER

infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat



JALAN BEBAS ODOL DEMI KESELAMATAN

INFO KHUSUS

Dukungan
Transportasi
Darat Pada
MotoGP 2022

KENDARAAN INI
OVER DIMENSI
OVER LOAD

Angkutan jalan perintis menghubungkan daerah terisolir, terpencil dan tertinggal, serta tidak terdapat penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis tidak menguntungkan.

Layanan angkutan jalan perintis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap mobilitas masyarakat di wilayah terpencil. Kehadirannya sangat menunjang aktivitas masyarakat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional.

Sebuah bus Damri Perintis sedang melintas di jalan tak beraspal di Desa Manubelon, Kupang, Nusa Tenggara Timur (08/01/2022).
Foto: HMS DJPD/WBW

Rakornis Perhubungan Darat 2022, Sinergikan Transportasi Darat Indonesia

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat bagi seluruh insan transportasi darat mulai dari pembuat kebijakan, pengamat transportasi atau akademisi, operator, asosiasi, hingga para petugas yang melaksanakan kebijakan dan pengawasan di lapangan saling bersinergi menciptakan suasana transportasi darat maupun penyeberangan yang kondusif, aman, nyaman, serta berkeselamatan.



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat 2022 pada 29/3/2022, bertempat di The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Transportasi Darat Menuju Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh” dihadiri oleh +- 1.800 peserta secara *offline* dan *online*.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam laporannya, mengatakan, “Penyelenggaraan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 kali ini dimaksudkan sebagai wadah konsolidasi maupun kaji ulang berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis Perhubungan Darat untuk dapat dilaksanakan dengan optimal untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang Perhubungan Darat yang lebih baik di pusat maupun daerah.”

Sementara itu, dalam sambutannya ketika membuka kegiatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sejumlah arahan

kepada jajaran Ditjen Perhubungan Darat dalam melaksanakan program kerjanya di tahun 2022.

Sejumlah arahan Menhub diantaranya yaitu: pertama, memastikan program yang dijalankan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Kalau bangun terminal atau bus penumpangnya banyak dan tempatnya bersih. Kita ingin angkutan bus makin diminati masyarakat,” ungkap Menhub.

Kedua, meningkatkan konektivitas antar moda transportasi jalan dengan moda lainnya seperti kereta api. Ketiga, berkolaborasi dengan sejumlah pihak, yakni: akademisi, daerah, swasta, masyarakat dan unsur terkait lainnya untuk terus meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan jalan. Dan terakhir, mengantisipasi terbatasnya alokasi anggaran APBN dengan membentuk Badan Layanan Umum pada sejumlah BPTD yang memiliki potensi, agar dapat secara mandiri meningkatkan pelayanannya tanpa harus mengandalkan APBN. (*)

Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman? Bersua kembali dalam *Newsletter* infoHUBDAT sebagai media untuk bersilaturahmi dan berbagi informasi. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, dengan harapan dapat menjadi motivasi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.

Pembaca yang budiman, seiring dengan situasi pandemi di Indonesia yang berangsur membaik, sudah semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksinasi, bahkan kini sudah vaksin *booster*, pemerintah memutuskan untuk memberikan kelonggaran persyaratan perjalanan di semua moda transportasi. Namun demikian hal ini jangan membuat kita abai terhadap perilaku hidup sehat dan protokol kesehatan yang telah kita jalani pada masa pandemi ini.

Pada triwulan pertama tahun 2022 ini, kita menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita antara lain dengan upaya penanganan kendaraan *over dimension over load* (ODOL) untuk menuju target Indonesia Bebas ODOL 2023. Gencarnya operasi penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL ternyata menimbulkan resistensi dari para pelaku usaha transportasi, baik para transporter maupun pengusaha pemilik barang. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah, di satu sisi kita ingin agar semua pengguna jalan terjamin keselamatannya, namun di sisi lain upaya menekan praktek ODOL agar dapat tetap menjaga harkat hidup masyarakat terutama mereka yang berprofesi sebagai pengemudi truk. Oleh karena itu sosialisasi terhadap kebijakan ODOL ini tidak saja diperuntukkan bagi pengemudi truk, tetapi juga harus dapat menyasar para pengusaha transportasi, pemilik kendaraan, pemilik barang, dan para pengguna jasa angkutan barang pada umumnya.

Pembaca sekalian, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga turut mendukung penyelenggaraan agenda-agenda internasional yang dapat mendorong gairah dunia pariwisata di Indonesia. Diantaranya *event* MotoGP yang diselenggarakan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah dukungan kita berikan, baik dari aspek penyediaan sarana angkutan *shuttle bus* dalam kawasan Mandalika, angkutan antar moda, fasilitas integrasi moda, perlengkapan jalan, serta dukungan transportasi penyeberangan untuk akses antar pulau.

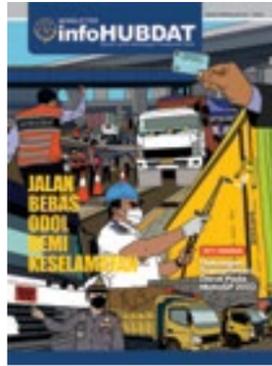
Akhir kata, saya sampaikan himbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.





**Ilustrasi Cover:
HMS DJPD/CAS**

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan masalah *Over Dimension Over load (ODOL)*. Langkah preventif, sosialisasi, hingga operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL terus dijalankan demi mencapai target Indonesia Zero ODOL 2023.

PENANGGUNG JAWAB
Marta Hardisarwono

REDAKTUR PELAKSANA
Endy Irawan

REDAKTUR UTAMA
Pitra Setiawan
Nanang Rahardjo
Aznal

REDAKTUR
Ardian Sukmaji
Dinda Siahaan
Alvia Lilian
Hanna Suryadika

**DESAIN GRAFIS
DAN FOTOGRAFI**
M. Aulia Dharna
Herman Wibowo
Bayu Adi Saputro
Rinjani Pangestu

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Ratna Syaka Aprilda
Sari Hayu Hutami
Ely Rusnita
Yudha Kurniawan
Kurniadi Zaini
Didik Prasetyo
Rifai Dyan Armananta
Nolita
Rusdinal
M. Farid Ardiansyah
M. Fadil Imaddudin
Achmad Maulana
Achmad Nanang
Rosmala Damayanti
Nova Yulianasari Sopiha
Reza Saputra
Nurfadilah Sinta Ningrum
Ade Yunita
Ardianto
Rina Noviana
Septriana Dia Areta

KONTRIBUTOR
Junedi Sembiring
Nurita Aprilianing Tyas
Marisa
Wahyu Arya Putra
Prisca Magdalena Samosir
Arief Eko Sumba
Cristian Andri Mardhani
Erlieka Affan
Ririn Scorviyanti
Rinto Mahendra Raharjo



Diterbitkan oleh:

Humas Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat
Gedung Karya Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 8
Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : humas.hubdat@gmail.com

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

ditjen perhubungan darat

Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Seiring dengan situasi pandemi yang berangsur membaik, pemerintah telah melakukan pelonggaran persyaratan perjalanan di semua moda. Bahkan ketentuan jaga jarak pada transportasi umum sudah tidak diberlakukan. Namun demikian protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Disiplin selalu memakai masker dan mencuci tangan diharapkan dapat turut menjaga kesehatan masyarakat.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menyuguhkan Laporan Utama mengenai upaya-upaya penanganan kendaraan *over dimension* dan *over loading (ODOL)*, dengan judul Jalan Bebas ODOL Demi Keselamatan. Beberapa artikel telah kami siapkan untuk mendukung laporan utama, antara lain: Skema Baru Penanganan ODOL, Utamakan Edukasi dan Sosialisasi; Normalisasi Truk ODOL di Banyuwangi; Niat Bersama Menertibkan Truk ODOL; dan Keresahan Pengemudi Angkutan Barang.

Kemudian, kami sajikan pula hasil liputan Tim InfoHUBDAT ke Nusa Tenggara Timur, berupa artikel bertajuk Garda Transportasi Darat di Nusa Tenggara Timur, diikuti beberapa artikel pendukung antara lain Angkutan Jalan Perintis Tembus Pedalaman; Rute Angkutan Perintis Baru Untuk Dukung Pariwisata Pulau Rote; dan Penyeberangan Perintis di Nusa Tenggara Timur.

Tak kalah menarik, artikel mengenai Dukungan Sektor Transportasi Darat pada MotoGP Mandalika 2022, dan Kesiapan Sektor Transportasi Darat pada MotoGP 2022.

Kami tampilkan pula artikel bertajuk Angkutan Perkotaan di Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang, dan artikel Semangat Revitalisasi Terminal Tipe A.

Selain itu, ada pula ulasan mengenai Kesepakatan Pengoperasian *Local Port Service* di Pelabuhan Penyeberangan. Berikutnya, sebuah artikel tentang Audiensi dengan Pengemudi Truk dalam Rangka Penanganan ODOL turut melengkapi edisi kali ini.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. (*)



Dukungan Transportasi Darat pada MotoGP Mandalika 2022
Seorang penonton MotoGP hendak menaiki *shuttle bus* yang telah disediakan untuk transportasi di Kawasan Sirkuit Mandalika pada hari pertama perhelatan MotoGP Mandalika 2022 (17/3/2022). Foto: HMS DJPD/WBW

daftar isi EDISI TRIWULAN 01 / 2022

Info Utama

04 JALAN BEBAS ODOL, DEMI KESELAMATAN

Persoalan angkutan barang truk *over dimension* dan *over loading (ODOL)* bukan menjadi permasalahan transportasi semata, melainkan sudah memiliki dimensi sosial ekonomi karena terbentang dari hulu sampai hilir.

- 06 Skema Baru Penanganan ODOL, Utamakan Edukasi & Sosialisasi
- 08 Normalisasi Truk ODOL di Banyuwangi
- 10 Niat Bersama Menertibkan Truk ODOL

Info Khusus

- 15 Garda Transportasi Darat di Nusa Tenggara Timur
- 18 Angkutan Jalan Perintis Tembus Pedalaman
- 22 Rute Angkutan Perintis Baru Untuk Dukung Pariwisata Pulau Rote
- 24 Penyeberangan Perintis di Nusa Tenggara Timur
- 26 Dukungan Sektor Transportasi Darat Pada MotoGP 2022
- 28 Pastikan Kesiapan Sektor Transportasi Darat pada MotoGP 2022

Info Angkutan

- 30 Angkutan Perkotaan di Kawasan Mebidang

Info Prasarana

- 32 Semangat Revitalisasi Terminal Tipe A

Info TSDP

- 34 Kesepakatan Pengoperasian *Local Port Services* Di Pelabuhan Penyeberangan

Info Lalu Lintas

- 36 Audiensi dengan Pengemudi Truk Dalam Rangka Penanganan ODOL

Info KSLN

- 38 Siap Implementasikan Sistem Transportasi Cerdas, Kemenhub Teken Nota Kesepakatan dengan Korea



Info Selintas

- 37 Program BTS Teman Bus Aktif Beroperasi Kembali
- Tingkatkan Prokes Di Simpul Transportasi, Kemenhub Bagikan 10.000 Paket *Healthy Kit* Gratis
- Hindari Kemacetan Saat Libur Nasional, Kawasan Puncak Berlaku Ganjil-Genap
- Siap Implementasikan Sistem Transportasi Cerdas, Kemenhub Teken Nota Kesepakatan dengan Korea
- Pasca Insiden Cabut Berkas Paksa, Ditjen Hubdat Tingkatkan Keamanan UPPKB Balonggandu
- Antisipasi Erupsi Gunung Anak Krakatau, Dirjen Hubdat Imbau Operator Kapal Untuk Waspada
- Mitigasi Kecelakaan di Simpang Rapak

Lensa Hubdat

- 41 Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

Jalan Bebas ODOL, Demi Keselamatan

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, persoalan angkutan barang truk *over dimension* dan *over load* (ODOL) bukan menjadi permasalahan transportasi semata, melainkan sudah memiliki dimensi sosial ekonomi karena terbentang dari hulu sampai hilir.

Hal ini membutuhkan komitmen bersama melalui koordinasi lintas instansi. “Seperti Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah hingga asosiasi pengusaha transportasi logistik,” kata Menhub.

Over Dimension merupakan suatu kondisi, di mana dimensi kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik, atau terjadi modifikasi, baik panjang, lebar, atau pun tingginya. Sedangkan *over load* merupakan kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan melebihi batas beban yang ditetapkan.

Ada dua hal yang penting dampak dari keberadaan truk ODOL, yaitu infrastruktur jalan cepat rusak hingga rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

“Dari data kementerian PUPR secara ekonomi setiap tahun negara dirugikan Rp 43 triliun, akibat harus memperbaiki jalan yang rusak karena truk ODOL,” kata Menhub.

Risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan truk ODOL dapat dilihat dari data. Tercatat sebagian besar angkutan barang atau 74 -93 persen melanggar ketentuan. Tak heran, angkutan barang menjadi penyumbang



besar kecelakaan setelah sepeda motor.

Indonesia Bebas ODOL 2023

Kebijakan Bebas ODOL, sejatinya telah digagas sejak tahun 2018, namun pada waktu itu muncul masukan dari berbagai pihak antara lain aspirasi dari asosiasi logistik, yang kemudian disepakati untuk ditunda hingga 2023. Tahun ini merupakan tahun terakhir untuk mempersiapkan target itu tercapai.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan bahwa dalam penanganan ODOL tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat. “Kita semua sepakat,

bahwa itu (ODOL) harus ditangani bersama,” katanya.

Dirjen Budi melanjutkan, “Kemenhub bersama Polri sepakat akan lebih mengedepankan aspek edukasi, kampanye, dan sosialisasi dalam penanganan ODOL.” Namun hal ini bukan berarti tidak ada penegakan hukum sama sekali. “Penegakan hukum tetap akan diterapkan, tapi kepada pelanggaran yang kebangetan sekali, misalnya muatan lebih dari 100%,” ujarnya.

Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, mengatakan bahwa dalam penanganan ODOL, Polri juga mengedepankan langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan sosialisasi. “Penegakan hukum adalah



pilihan terakhir yang dilakukan, semata-mata demi keselamatan. Baik keselamatan pengemudi itu sendiri maupun pengguna jalan yang lain,” katanya.

Dari konsekuensi hukum terdapat perbedaan antara *Over Dimension* dan *Over load*. Pelanggaran *over dimension* adalah kejahatan, oleh karena itu seharusnya bukan ditilang tetapi akan dilakukan penyidikan. Sasarannya adalah pemilik kendaraan dan juga bengkel karoseri yang memodifikasi kendaraan tersebut. Pengemudi tidak dilibatkan. Sedangkan pelanggaran *over load* adalah tindak pidana ringan yang apabila kedapatan melanggar akan ditilang atau pun tindakan hukum lain seperti keharusan untuk melakukan transfer muatan yang biayanya dibebankan kepada pengemudi/ pihak pengangkut.

Kemenhub sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk membebaskan jalan-jalan di Indonesia dari praktek ODOL. “Pertama, di sini kita akan melakukan kembali inventarisasi

dan komunikasi kepada semua asosiasi, baik asosiasi karoseri, pengemudi, logistik, dan juga operator,” ujar Dirjen Budi. “Akan kita perbanyak untuk bisa ketemu, silaturahmi, menyampaikan pesan dan juga mendengarkan keluhan semua operator ini,” kata Budi Setiyadi.

Berikutnya, Kementerian Perhubungan juga akan melakukan edukasi, kampanye maupun sosialisasi. “Kalau ini sudah kita lakukan, mendekati tahun 2023, kami sudah bersepakat dengan Korlantas Polri akan memperbanyak menyangkut penindakan dan pengawasan, termasuk juga normalisasi,” ungkapnya.

Perbaiki Tata Kelola Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Selanjutnya, secara internal Kementerian Perhubungan juga akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan uji berkala, tata kelola penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Kendaraan Bermotor.

Dirjen Budi menjelaskan salah satu upaya pencegahan truk ODOL ini adalah dengan mencegah adanya pemalsuan bukti lulus uji kendaraan bermotor (KIR). Sejak tahun 2020 yang lalu, karena banyaknya pemalsuan, pihaknya sudah mengganti bukti uji KIR yang sebelumnya berbentuk buku, diubah menjadi berbentuk kartu atau yang dinamakan BLUe (Bukti Lulus Uji elektronik).

“Pada tahun 2020 kami telah mengganti buku uji kir yang sebelumnya karena banyak memiliki kelemahan seperti pemalsuan, sehingga diganti dengan BLUe yang di dalamnya ada chip dan terdapat data lengkap kendaraan,” tutur Dirjen Budi.

Terakhir, nantinya Kemenhub pun akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama menyangkut masalah penerbitan sanksi.

“Sanksi itu tidak hanya dikenakan kepada pengemudi saja, tapi juga adalah kepada para operator pemilik barangnya. Ini yang belakangan ini diminta asosiasi pengemudi untuk dilakukan percepatan,” tegas dia.*

Skema Baru Penanganan ODOL, Utamakan Edukasi & Sosialisasi

Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri saat ini tengah berkoordinasi untuk mengatur skema baru terkait penanganan *Over Dimension* dan *Over Load* (ODOL)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyampaikan secara virtual kepada media, Kamis (24/02) bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan mengusahakan agar iklim usaha transportasi logistik tetap sekompetitif mungkin.

“Pada dasarnya seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memberantas ODOL merujuk amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya mengatur jumlah barang yang dimuat oleh kendaraan barang harus sesuai dengan Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) serta pengemudi wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, dimensi, daya angkut kendaraan, dan kelas yang dilaluinya,” jelas Dirjen Budi.

Dirjen Budi menambahkan, “Langkah-langkah yang dilakukan (Ditjen Hubdat) sudah banyak sekali misalnya

pada tahap edukasi, kampanye, dan sosialisasi. Kegiatan ini menasar para asosiasi, penjual kendaraan logistik, juga Agen Pemegang Merek (APM). Prioritas penanganan ODOL saat ini berubah ke arah *soft power*, namun penegakan hukum tetap dilakukan secara bertahap untuk memastikan terjaminnya aspek keselamatan,” tambah Dirjen Budi.

Ia juga menyatakan bahwa saat ini seluruh kegiatan penanganan truk ODOL, akan berjalan secara simpatik sebagai bentuk tindakan preventif dan edukatif.

Dirjen Budi menegaskan, operasi simpatik tersebut akan difokuskan pada upaya edukasi kepada pemangku kepentingan khususnya pengemudi, pemilik kendaraan, dan pelaku usaha.

Lanjutnya, Ia mengatakan sejak tahun 2018 Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai langkah preventif agar tidak banyak kendaraan

barang yang melanggar batas muatan dan dimensi. “Apa saja tindakan preventifnya? Misalnya seperti melakukan koordinasi agar masing-masing Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di 25 wilayah se Indonesia untuk mengundang dealer kendaraan truk untuk tidak membuat rancang bangun truk serta memperjual-belikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuannya, serta meminta kepada seluruh Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang bertugas harus bertindak tegas agar tidak meloloskan mobil-mobil yang kelebihan muatan maupun dimensi,” jelas Dirjen Budi.

Kemudian Dirjen Budi menyampaikan bahwa secara bertahap Kemenhub telah

Sebuah kendaraan truk yang over dimensi terjaring Operasi Penegakan Hukum Kendaraan ODOL di Eks Gerbang Tol Cikarang Utama Km 29a, 30/12/2021. Foto: HMS DJPD/WBW.

melakukan sosialisasi kepada pengusaha maupun pemilik kendaraan angkutan barang agar segera melakukan normalisasi kendaraannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan keamanan.

Lebih Lanjut lagi, Dirjen Budi menjelaskan salah satu upaya pencegahan truk ODOL ini adalah dengan mencegah adanya pemalsuan KIR. Sejak tahun 2020 yang lalu, pihaknya sudah mengganti bukti uji KIR yang sebelumnya berbentuk buku, namun karena banyaknya pemalsuan sehingga diubah menjadi berbentuk kartu atau yang dinamakan BLUe (Bukti Lulus Uji elektronik).

“Pada tahun 2020 kami telah mengganti buku uji kir yang

sebelumnya karena banyak memiliki kelemahan seperti pemalsuan, sehingga diganti dengan BLUe yang di dalamnya ada chip dan terdapat data lengkap kendaraan,” tutur Dirjen Budi.

Sebelumnya pada hari ini, Dirjen Budi juga telah melakukan audiensi dengan para pengemudi dan pemilik truk yang melakukan demo di beberapa wilayah. Menurutnya, beberapa tuntutan antara lain meminta adanya perbaikan tarif. “Memang karena tarif ini jadi memaksa para pengemudi untuk mengangkut barang secara berlebihan, mungkin dengan tarif yang rendah. Untuk soal tarif ini kami harus mencari jalan keluar apakah nanti akan bertemu dengan perwakilan asosiasi logistik atau bertemu dengan Kementerian Perindustrian,” jabarnya.

Pada kesempatan ini, Dirjen Budi juga berharap agar ke depannya seluruh pihak yang terlibat dapat menjaga iklim angkutan barang menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan mengutamakan aspek keselamatan.

Sementara itu, Kasubdit Penindakan dan Pelanggaran (Dakgar) Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol Made Agus Prasatya mengatakan, “Untuk penanganan ODOL, saat ini kami dari Korlantas Polri tetap mengedepankan tindakan sosialisasi yang massif secara kolaboratif termasuk kegiatan-kegiatan preventif. Untuk segi penegakan hukum, kita akan melakukan secara selektif prioritas, kita betul-betul akan menilai terutama yang ODOL dan berpotensi laka lantas yang sangat fatal”.(*)





Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan pemotongan bak truk yang over dimensi menggunakan alat las blender di Banyuwangi, 7/2/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

JALAN BEBAS ODOL, DEMI KESELAMATAN

melakukan sosialisasi kepada pengusaha maupun pemilik kendaraan angkutan barang agar segera melakukan normalisasi kendaraannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutur Dirjen Budi.

Menurutnya, permasalahan truk ODOL ini perlu segera ditangani. "Seperti laporan dari Bapak Menteri PUPR bahwa setiap tahunnya negara mengalami kerugian untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak akibat truk ODOL kurang lebih sebesar 43 triliun Rupiah. Di mana dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," kata Dirjen Budi.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, "Kami menyambut baik kegiatan ini khususnya menyangkut masalah keselamatan sehingga diharapkan ke



depannya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi yang diakibatkan truk ODOL tidak terjadi kembali dan usia jalan

menjadi lebih lama karena tidak dilalui kendaraan yang melebihi tonase yang semestinya."

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan normalisasi secara bertahap terhadap 1.500 kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) atas inisiasi para operator angkutan barang di Kabupaten Banyuwangi. Adapun kegiatan tersebut dilakukan secara simbolis di Waduk Sidodadi, Glenmore dan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kab. Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin (7/2).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, "Saya mengapresiasi para supir dan pemilik kendaraan di wilayah Kab. Banyuwangi secara sukarela dan mandiri melakukan normalisasi kendaraannya. Selain itu berdasarkan data yang diterima bahwa pada tahun 2022 ini akan dilakukan normalisasi secara

NORMALISASI TRUK ODOL DI BANYUWANGI

Seiring dengan komitmen yang telah disepakati, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada pengusaha maupun pemilik kendaraan angkutan barang agar segera melakukan normalisasi kendaraannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

bertahap kendaraan truk dan *dump truck* sebanyak kurang lebih 1.500 kendaraan. Semoga upaya yang telah dilakukan ini dapat diikuti oleh supir dan pemilik kendaraan di seluruh Indonesia sehingga program Indonesia Zero ODOL tahun 2023 dapat terwujud," tegas Dirjen Budi.

Diketahui sejak tahun 2017, Kementerian Perhubungan bersinergi dengan K/L terkait dan berkomitmen mewujudkan Indonesia *Zero ODOL* pada tahun 2023. "Seiring dengan komitmen yang telah disepakati, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyerahkan penghargaan kepada perwakilan Asosiasi Sopir Logistik Indonesia atas partisipasi pelaksanaan Normalisasi Kendaraan ODOL di Banyuwangi, Jawa Timur, 7/2/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

Senada dengan pernyataan Bupati, Ketua Pilot Project Indonesia Jaenuri mengatakan, "Kegiatan hari ini merupakan salah satu bentuk keikutsertaan Pilot Project Indonesia dalam mendukung program pemerintah Zero ODOL pada tahun 2023. Kami memiliki tekad untuk berperan aktif mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah."

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisi IV DPRD Banyuwangi Fiky Septalinda, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Aan Suhanan, Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur Tonny Agus Setiono, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono, Perwakilan Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi, Perwakilan DPP Aprindo, Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) Slamet Barokah. (*)



Petugas sedang memeriksa kendaraan dalam Operasi Penegakan Hukum Kendaraan Over Dimensi Overload di Eks Gerbang Tol Cikarang Utama. Foto: HMS DJPD/BYU

Niat Bersama Menertibkan Truk ODOL

Oleh: Djoko Setijowarno

Hampir setiap hari terbit berita kecelakaan truk ODOL. Entah sudah berapa ribu nyawa meregang di jalan raya akibat operasi truk ODOL. Harus ada niat bersama dari semua pemangku kepentingan untuk menertibkan operasi truk ODOL menuju Zero Truk ODOL Januari 2023. Penyelenggaraan truk ODOL masuk kategori tindakan korupsi, merugikan negara tidak langsung.



Permasalahan kelebihan muatan pada angkutan barang atau biasa disebut *over dimension over load* merupakan permasalahan yang telah terjadi

sejak lama. Permasalahan *over dimension over load* atau ODOL memberikan dampak yang luar biasa antara lain, menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas, menimbulkan kerusakan

infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, menimbulkan polusi udara, serta menyebabkan ketidakadilan dalam usaha pengangkutan logistik.

Pemberantasan truk ODOL harus komprehensif dari hulu hingga hilir. Korlantas peduli akan masalah ODOL (*over dimension* dan *over loading*) yang berdampak pada terjadinya kecelakaan dan kemacetan serta masalah lalu lintas lainnya. Odol juga berdampak pada kendaraan tidak dapat dioperasikan sebagaimana seharusnya (Irjen. Pol. Firman Setyabudi).

Setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan raya harus memalui proses uji tipe. Setelah lolos uji tipe akan dikeluarkan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Ditjen Hubdat yang selanjutnya oleh Polri akan dikeluarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan plat nomor kendaraan.

Pengujian kendaraan bermotor (PKB) untuk angkutan umum (barang dan penumpang) wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali. PKB diselenggarakan oleh Dishub Kabupaten/Kota. Pelaksanaan

JALAN BEBAS ODOL, DEMI KESELAMATAN

PKB di daerah dipandang sebagai sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), bukan memandangnya bagian dari aspek keselamatan berkendara. Penyelenggaraan PKB di kota relatif lebih baik ketimbang sejumlah PKB Kabupaten. Kendala luas wilayah kabupaten menjadikan kurang efektifnya pelaksanaan PKB.

Numpang uji yang tujuannya memudahkan pemilik truk melakukan uji berkala, namun dalam pelaksanaannya kerap disalahgunakan, sehingga diperlukan pengawasan lebih ketat lagi oleh Ditjen Hubdat sebagai pembuat aturan.

Bimbingan Teknis Diperbanyak untuk Meningkatkan Profesionalisme Para Penguji.

Saat ini terdapat 314 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) atau 61 persen dari 508 kabupaten/kota se Indonesia. Masih ada 194 kabupaten yang belum memiliki UPUBKB. Perlu bantuan Ditjen Hubdat membantu daerah yang belum memiliki UPUBKB.

PKB yang tidak dapat diselenggarakan sesuai peraturan dapat diambil alih Ditjen Hubdat untuk dikelola. Sekarang sudah ada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di setiap provinsi dapat menjadi penyelenggara PKB di daerah.

Perusahaan angkutan umum juga wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan sesuai PM Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum. Ditjen Hubdat



Seorang petugas sedang menunjukkan stiker bertuliskan "kendaraan ini overload dan tidak tertib muatan" yang ditempel pada kaca depan kendaraan truk. Foto: HMS DJPD/BYU

dapat mempercepat proses SMK ke seluruh perusahaan angkutan umum. Anggaran ditambah untuk mempercepat semua perusahaan angkutan umum dapat menyelenggarakan SMK.

Permasalahan over dimension over load atau ODOL memberikan dampak yang luar biasa antara lain, menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas, menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan.

Sistem Manajemen Keselamatan perusahaan angkutan umum meliputi komitmen dan kebijakan, pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, dokumentasi dan data, peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan evaluasi, dan pengukuran kinerja.

Masih terdapat perusahaan karoseri truk yang menerima order untuk menambah kapasitas truk (over dimensi) perlu dilakukan pendataan dan ditertibkan. Jika berulang kali ditertibkan dan dibina masih tetap melakukan pelanggaran, upaya tindakan hukum dapat dilanjutkan.

Masih ada asosiasi logistik belum menerima alias menolak rencana

Zero ODOL Januari 2023 dengan berbagai alasan. Padahal asosiasi logistik selama ini sudah menikmati keuntungan yang berlebih atas bisnisnya. Hendaknya, asosiasi logistik turut mendukung program ini.

Di Indonesia terdapat 141 Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Yang diserahkan pemda ke Ditjen Hubdat sebanyak 134 UPPKB (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 529 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Seluruh Wilayah Indonesia). Ada 7 UPPKB tidak diserahkan, yakni UPPKB Trantang Manuk (Riau); UPPKB Air Sebakul (Bengkulu); UPPKB Tugu (Jateng); UPPKB Katonsari (Jateng); UPPKB Butuh (Jateng); UPPKB Amurang (Sulut); dan UPPKB Waena (Papua). Hingga tahun 2021 sudah 81 UPPKB yang dioperasikan.

Keberadaan UPPKB di beberapa lokasi khususnya di Jawa dan Sumatera sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan sejumlah truk untuk diperiksa. Pasalnya, volume kendaraan angkutan barang sudah tinggi. Kapasitas UPPKB yang ada tidak dapat lagi menampung kendaraan barang yang lewat yang semuanya harus diperiksa dengan masuk ke UPPKB. Akibatnya, se-

bagian kendaraan antre di badan jalan. Antrean kendaraan barang tersebut dapat disebabkan kapasitas UPPKB yang terbatas atau disengaja pengemudi truk menunggu operasi di UPPKB berakhir baru perjalanan dilanjutkan.

Selama kendaraan masuk UPPKB, dilakukan pencatatan, pengawasan dan penindakan angkutan barang terhadap tata cara pemuatan barang, dimensi kendaraan angkutan barang, tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang, dokumen angkutan barang, kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa, dan jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

Ditjen Hubdat sudah melakukan pemotongan terhadap sejumlah truk over dimensi. Akan tetapi, ada juga ulah pengusaha truk untuk menyambung lagi, karena kalkulasi bisnisnya, jika didenda masih menguntungkan. Artinya, besaran sanksi/denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih kurang tinggi dan UU tersebut harus direvisi untuk menaikkan besaran sanksi/denda.

Tuntutan kerja profesional pengemudi truk tidak setara dengan pendapatan yang diperolehnya. Kesejahteraan pengemudi truk harus ditingkatkan. Bimbingan teknis bagi pengemudi truk harus dilakukan secara rutin oleh BPSDM Perhubungan. Dapat pula bekerjasama dengan PT Asuransi Jasa Raharja dalam penyelenggaraan dan pendanaannya.

Penggunaan alat penimbangan *Weigh in Motion* (WIM) untuk pengawasan dan penegakan hukum kendaraan angkutan barang. Penggunaan WIM ada di UPPKB Kulwaru (Yogyakarta), UPPKB Balonggandu dan UPPKB Losarang (Jawa Barat). Pertimbangan SDM, lahan UPPKB, anggaran operasional, pemasangan WIM di semua UPPKB harus segera dilakukan.



Petugas Polisi di Jerman sedang memeriksa kendaraan truk yang diduga kelebihan muatan atau pun melanggar tata cara muat. Foto: trans.info

Lebih efisien untuk operasional dan dapat mengurangi konflik kepentingan.

Pengalihan angkutan barang ke jalan rel dapat dilakukan asalkan tarif menggunakan jalan raya lebih murah. Kementerian Perhubungan harus memperhatikan keberadaan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan untuk dipasang alat penimbangan kendaraan bermotor. Supaya kapal tidak merugi dan membahayakan keselamatan pelayaran akibat memuat truk ODOL.

Di Indonesia terkesan bahwa peraturan banyak dibuat hanya sebagai ladang pungutan liar bagi oknum petugas di lapangan. Kebijakan Zero Truk ODOL tidak akan tercapai entah sampai tahun berapa pun, jika hanya terjadi saling menyalahkan saja.

Dalam berbagai kesempatan saling menyalahkan membuat pihak regulator dan operator saling curiga, tidak ada saling kepercayaan dan selalu saling mempersiapkan kuda-kuda untuk bertarung.

Karena *effort* yang diberikan selama ini tidak pada akar rumput, tapi memang dibuat saling gigit-menggigit, regulator menggigit pengusaha truk maksudnya agar pengusaha truk menggigit pemilik barang dan hal itu tidak mungkin terjadi. Karena pengusaha truk dan

pemilik barang adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam hal penertiban Truk ODOL.

Di Indonesia yang tadinya bagaikan di hutan belantara karena terjadi pembiaran dalam banyak hal sejak 1945 dan banyak kesalahan yang sudah akut dan dianggap benar, jika mau dibereskan secara tiba-tiba memang butuh *effort* yang luar biasa.

Di Jerman saja Polisi Autobahn masih sering berurusan dengan truk-truk yang diduga bermuatan *overload* dan pelanggaran tata cara muat (di sana *strict* sekali), apalagi truk-truk Eropa Timur.

Di Eropa Timur, Polisinya masih sering terima suap, tidak demikian halnya dengan di Eropa Barat. Mungkin di Indonesia perlu diseragamkan dulu aturannya, agar petugas di lapangan dan pelaku transportasi tidak sama-sama bingung, baru bisa diambil tindakan yang seragam di seluruh Indonesia.

Uni Eropa yang terdiri dari beberapa negara saja akhirnya bisa menyeragamkan peraturan, karena ada niat bersama.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

Keresahan Pengemudi Angkutan Barang

Pengemudi truk menjadi ujung tombak angkutan logistik. Namun kesejahteraan yang didapat tidak setara julukan itu. Membawa kelebihan muatan tidak diinginkan, karena mereka tahu kalau hal itu berisiko terhadap keselamatannya. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dan dalam kondisi hidup pastilah akan dijadikan tersangka.



Kecelakaan maut terjadi di lampu lalu lintas (traffic light) Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 21 Januari 2022 pukul 06.15 WIB. Kecelakaan melibatkan truk tronton bermuatan kapur pembersih air bertonase 20 ton menyeruduk belasan mobil dan sepeda motor yang sedang berhenti di lampu lalu lintas. MA, sopir truk tronton bernomor polisi KT 8534 AJ, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. (Foto: Istimewa)

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno berpendapat bahwa sesungguhnya, akar masalah truk ODOL (*Over Dimension Over Load*) adalah tarif angkut barang semakin rendah, karena pemilik barang tidak mau keuntungan selama ini berkurang (padahal biaya produksi

dan lainnya meningkat), pemilik armada truk (pengusaha angkutan barang) juga tidak mau berkurang keuntungannya. Hal yang sama, pengemudi truk tidak mau berkurang pendapatannya.

Menurut Djoko, kelebihan muatan (*over load*) dengan menggunakan

kendaraan berdimensi lebih (*over dimension*) untuk menutupi biaya tidak terduga yang dibebani ke pengemudi truk. Sejumlah uang yang dibawa pengemudi truk untuk menanggung beban selama perjalanan, seperti tarif tol, pungutan liar yang dilakukan petugas berseragam dan tidak seragam, parkir, urusan ban pecah, dan sebagainya. Uang dapat dibawa pulang buat keperluan keluarga tidak setara dengan lama waktu bekerja meninggalkan keluarga.

Akhirnya, sekarang profesi pengemudi truk tidak memikat bagi kebanyakan orang, semakin sulit mendapatkan pengemudi truk yang berkualitas. Tekanan terbesar ada pada pengemudi truk karena mereka yang berhadapan langsung dengan kondisi nyata di lapangan.

Populasi pengemudi truk kian makin berkurang, jika masih ada yang bertahan sebagai pengemudi truk, disebabkan belum punya alternatif pekerjaan yang lain. Ke depan, Indonesia akan banyak kehilangan pengemudi truk yang profesional.

Cukup *cost recovery*

Di samping itu, ada sejumlah BUMN yang bergerak di sektor transportasi. Sebenarnya, tidak semua perusahaan milik negara ditarget keuntungan. Harusnya BUMN seperti itu tidak perlu untung, *cost recovery* saja sudah cukup.

Di Australia, ada kebijakan pemerintah terhadap perusahaan telekomunikasi yang tidak dituntut untung besar. Namun ditarget asal bisa memberikan layanan ke seluruh negerinya yang cukup luas dan biaya yang dipungut sudah bisa menutup operasional perusahaan sudah cukup.

Sekarang ini, semua perusahaan BUMN diwajibkan raih keuntungan sebesar-besarnya. Jika tidak memberikan keuntungan tinggi, jajaran direksinya bisa dicopot.

Perum Damri, PT Pelni, PT KAI, PT ASDP, PT Jasa Marga, dan BUMN lain sejenis tidak perlu ditarget keuntungannya sebesar-besarnya. Apalagi perusahaan itu berkecimpung untuk melayani publik. Misalnya, untuk tarif kendaraan barang masuk jalan tol, tarif kapal penyeberangan, tarif menggunakan KA, tarif menggunakan kapal laut tidak perlu naik terus setiap tahun.

Jika pemerintah menyebutkan keberadaan jalan tol akan meningkatkan mobilitas angkutan logistik nasional. Apakah benar, dengan tarif kendaraan barang yang tinggi ketika menggunakan tol, lantas angkutan barang berbondong-bondong semua kendaraan barang menggunakan jalan tol?

Jika menghendaki semua angkutan barang menggunakan jalan tol yang ada, tarifnya harus lebih murah dari yang sekarang. Kompensasinya, tarif kendaraan pribadi lebih tinggi daripada kendaraan barang. Jika belum memenuhi masa konsesi, maka masa konsesi dapat diperpanjang. Asalkan jalan tol memang benar-benar dapat melancarkan angkutan logistik. Yang jelas, angkutan barang yang lewat tol tidak ODOL. Di samping itu, penetapan tarif angkut barang dapat

dikendalikan pemerintah dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Supaya pemilik barang tidak sekenanya menentukan tarif yang berujung pengemudi truk harus mengangkut muatan yang berlebihan (overload) dengan kendaraan berdimensi lebih (over dimension). Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak hanya pengemudi yang dijadikan tersangka, namun pemilik barang dan pemilik angkutan juga harus dimintakan pertanggungjawabannya.

Jadikanlah pengemudi truk mitra, bukan selalu dijadikan tersangka. Tingkatkan kompetensinya dan naikkan pendapatannya.

Pemerintah selama ini baru mengajak pemilik barang dan pengusaha angkutan barang untuk berdiskusi menyelesaikan masalah truk ODOL. Tidak ada salahnya untuk mendengar keluhan pengemudi truk, karena mereka adalah bagian tidak terpisahkan dari proses mata rantai penyaluran logistik dari hulu hingga hilir.

Pelarangan operasi truk ODOL
Di Pusat, Proyek Strategis Nasional (PSN) agar tidak

mengoperasikan lagi truk ODOL. Terlebih akan membangun Ibu Kota Negara Nusantara, dapat memberikan contoh penggunaan angkutan barang sesuai aturan.

Di daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas PU, untuk menyampaikan kepada perusahaan yang menjadi binaannya untuk tidak mengoperasikan armada truk ODOL.

Harus diberikan apresiasi saat ini sudah bergerak bersama di semua daerah Polri, Ditjenhubdat dan Dishub untuk menertibkan angkutan barang yang melanggar aturan beroperasi di jalan raya.

Titik lemah penertiban/pemberantasan Truk ODOL ada di penegakan hukum. Beberapa daerah sudah mulai melakukan penegakan hukum. Jika konsisten, pasti ada perubahan. Jika hanya sekedar memenuhi perintah pimpinan dan hanya sesekali dilakukan, jangan harap ada perubahan.

Jadikanlah pengemudi truk mitra, bukan selalu dijadikan tersangka. Tingkatkan kompetensinya dan naikkan pendapatannya.*

Seorang pengemudi truk mendengarkan penjelasan dari petugas Subdit Dalops Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub terkait pelanggaran ODOL atas kendaraan yang dikemudikannya. Sejumlah kendaraan ditilang dalam Operasi Penegakan Hukum Kendaraan ODOL, di Eks Gerbang Tol Cikarang Utama Km 29a, 30/12/2021. Foto: HMS DJPD/WBW



BPTD WILAYAH XIII NUSA TENGGARA TIMUR

Garda Transportasi Darat di Nusa Tetap Tenteram

Provinsi Nusa Tenggara Timur, disingkat NTT bukan lagi berjuluk 'Nanti Tuhan Tolong' atau 'Nasib Tidak Tentu', tetapi mendapat julukan baru 'Nusa Tetap Tenteram. Demikian disampaikan oleh Gubernur NTT saat itu Frans Lebu Raya ketika kunjungan Presiden Jokowi ke NTT pada 2015 silam.

Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Balai Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIII

Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil

dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil di wilayah kepulauan.

BPTD Wilayah XIII NTT merupakan BPTD Tipe C yang mengelola angkutan jalan, UPPKB dan pelabuhan penyeberangan komersil maupun perintis. Tentunya dituntut penyelenggaraan bidang angkutan jalan dan bidang pelabuhan penyeberangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta pihak swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan.

Kepala BPTD Wilayah XIII NTT, Tito Gesit Utiarto mengakui tidak mudah menangani transportasi jalan dan TSDP dengan topografi kepulauan seperti NTT. Apalagi dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia namun dituntut untuk memberikan pelayanan prima dengan tetap mengedepankan faktor keamanan dan keselamatan.

Saat ini jumlah PNS ada 35 orang dengan tambahan PPNPN sebanyak 172 orang yang disebar di kantor pusat balai, dua UPPKB,

satu Terminal Tipe A dan 13 Satuan Kerja yang tersebar di 19 kabupaten dan 1 kota di provinsi NTT.

Secara umum, dalam melaksanakan tugasnya BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
- c) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidik dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
- d) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersil, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersil dan pelabuhan yang



Kepala BPTD Wilayah XIII Nusa Tenggara Timur, Tito Gesit Utiarto. Foto: HMS DJPD/WBW

belum diusahakan secara komersil, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersil dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

BPTD Wilayah XIII NTT mengelola Terminal tipe A di daerah Simoku yang saat ini masih dalam proses pembangunan dan akan selesai dalam tahun 2022 ini. Terminal ini akan menghubungkan kota Kupang dengan kabupaten-kabupaten lain di provinsi NTT.

Saat ini terdapat empat Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau yang sering disebut jembatan timbang di wilayah kerja BPTD XIII NTT.

1. UPPKB Nunbaun Sabu terletak di Jl. Pahlawan KM 3 Nunbaun Sabu Kec. Alak Kota Kupang. UPPKB Nunbaun Sabu selesai dibangun pada tanggal 31 Desember 2019 memiliki luas tanah 2.120 m². UPPKB Nunbaun Sabu diperoleh dari Hibah UPPKB Kupang.
2. UPPKB Oesapa terletak di Kel. Oesapa Kec. Kelapa

Lima Kota Kupang. UPPKB Oesapa selesai dibangun pada tanggal 31 Desember 1998, memiliki luas tanah 4.215 m². UPPKB Oesapa diperoleh dari Hibah UPPKB Kota Kupang. Namun UPPKB Oesapa akan dialih fungsikan menjadi Kantor BPTD Wilayah XIII NTT yang pembangunannya hampir selesai.

3. UPPKB Watualo terletak di Kel. Ndehes Kec. Wae Ri'i Kab. Manggarai. UPPKB Watualo selesai dibangun pada tanggal 31 Desember 1982 memiliki luas tanah 8.610 m². UPPKB Watualo diperoleh dari Hibah UPPKB Kab. Manggarai.
4. UPPKB Ngorang terletak di Kel. Ngorang Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat. UPPKB Ngorang selesai dibangun pada tanggal 31 Desember 2006 memiliki luas tanah 3.059 m². UPPKB Ngorang diperoleh dari Hibah UPPKB Manggarai Barat.

“Namun 2 unit UPPKB di Labuan B ajo yaitu UPPKB Ngorang dan UPPKB Watualo sejak diserahkan oleh Pemda NTT ke BPTD dalam kondisi tidak beroperasi. Sampai sekarang juga tidak dioperasikan karena dianggap tidak efektif, secara lokasi kurang ideal sebagai jembatan timbang,” jelas Tito.

Terkait dengan pengujian berkala kendaraan bermotor, BPTD Wilayah XIII NTT secara simultan terus menjalin kerjasama dengan Pemda dalam hal pengujian berkala kendaraan bermotor. Pemda mulai serius dalam pengujian. “Sekarang sudah ada 7 kabupaten dan kota yang terakreditasi pengujian berkala kendaraan bermotor dan akan terus bertambah,” jelas Tito.

“Kampanye pelarangan truk over dimension overload (ODOL) juga terus digencarkan. Jembatan timbang menjadi filternya dan sesekali dilakukan operasi penertiban.”

BPTD Wilayah XIII NTT sudah punya 5 MoU dengan Kabupaten Kupang, Belu, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Malaka. MoU nya adalah

melakukan penertiban dan pembinaan di 5 kabupaten itu secara bergantian. Juga ditempatkan Mobil Uji Keliling. Nanti ke kabupaten yang ada di Pulau Sumba dan Flores.

Hasilnya cukup efektif. Pelanggar truk ODOL selain harus membayar denda, mereka juga melakukan transfer muatan. Bahkan ada pengusaha angkutan yang suka rela melakukan pemotongan meskipun jumlahnya belum banyak. Acara pemotongan dihadiri sejumlah pejabat dari masing-masing kabupaten maupun pengusaha angkutan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari pulau-pulau didominasi oleh pelabuhan penyeberangan. BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki wilayah kerja Tiga Pelabuhan Penyeberangan yang tersebar di tiga Kabupaten yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi dan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo.

Selain itu ada 23 pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Adapun mengenai status pelabuhan ada yang aset milik Pemerintah Daerah tapi ada juga yang aset tanahnya milik pemda tapi aset bangunan milik Ditjen Hubdat. “Semuanya dalam pengawasan dan pembinaan BPTD Wilayah XIII NTT,” jelas Tito.

Perusahaan kapal penyeberangan yang beroperasi di provinsi NTT adalah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Flobamora. Setidaknya ada 21 kapal yang beroperasi saat ini, yang melayani 91 lintasan yang terdiri dari 62 lintasan komersial dan 29 lintasan perintis. (Tim InfoHUBDAT)(*)



UPPKB Nunbaun Sabu terletak di Jl. Pahlawan KM 3 Nunbaun Sabu Kec. Alak Kota Kupang. UPPKB Nunbaun Sabu selesai dibangun pada tanggal 31 Desember 2019 memiliki luas tanah 2.120 m². UPPKB Nunbaun Sabu diperoleh dari Hibah UPPKB Kupang.

ANGKUTAN JALAN PERINTIS TEMBUS PEDALAMAN

Hakekat pemberian subsidi bagi angkutan perintis adalah lokasi pelayanan untuk menghubungkan antara daerah terisolir, terpencil dan tertinggal, tidak ada penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis belum atau tidak menguntungkan.

Penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019. Ada dua kriteria untuk menetapkan angkutan jalan perintis, yaitu faktor finansial dan faktor konektivitas.

Kriteria faktor finansial berupa tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesibilitas angkutan antardaerah masih rendah; trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Sedangkan kriteria faktor konektivitas dapat berupa menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum; menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia; melayani daerah yang terkena dampak bencana alam; dan melayani perpindahan penumpang dari angkutan penyeberangan perintis

atau angkutan udara perintis. Pelayanan angkutan jalan perintis diselenggarakan pertama kali tahun 2001 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penyelenggaraan angkutan jalan perintis saat itu untuk 12 provinsi dengan 74 trayek layanan. Pada saat itu, subsidi yang diluncurkan sebesar Rp 4,6 miliar dan belum ada bantuan armada bus. Baru tahun 2004 ada program bantuan armada bus sejumlah 5 unit bus. Berikutnya, setiap tahun diadakan pengadaan armada bus untuk setiap membuka trayek baru atau menggantikan armada bus yang sudah rusak atau berakhir masa operasinya. Terakhir program bantuan armada bus itu diberikan tahun 2016 sebanyak 200 unit bus.

Pelayanan angkutan jalan perintis sudah berlangsung 20 tahun dan diselenggarakan di 32 provinsi.

“Perjuangan Damri Kantor Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur sangat luar biasa. Sungai, hutan dan pegunungan ditembusnya untuk memastikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat.”

Pada tahun 2021, pemerintah mengucurkan Rp 134,9 miliar untuk 324 trayek di 32 provinsi.

Angkutan Perintis di Kupang, Nusa Tenggara Timur Perjuangan Damri Kantor Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur sangat luar biasa. Sungai, hutan dan pegunungan ditembusnya untuk memastikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat.

Damri cabang Kupang saat ini melayani rute perintis yang melayani hampir seluruh Kota dan Kabupaten di Pulau Timor.



Bus Damri Cabang Kupang melaksanakan tugas memberi pelayanan angkutan jalan perintis di wilayah pedalaman dengan medan yang ekstrem dan prasarana jalan yang tidak memadai. Foto: HMS DJPD/WBW

Adapun trayek yang dilayani adalah: Kupang-Kuanfatu, Kupang-Fatumbasi, Kupang-Besnam, Kupang-Manubelon, Kupang-Naimata, Kupang-Oenlasi, Kupang - Ayotupas, Kupang-Oepoli, Kupang-Lelogama, Kupang-Tinis, Kupang-Oemoro, Kupang-Naimata. Saat ini sedang dipersiapkan layanan Damri Perintis di Pulau Rote yang melayani Rote Ba'a-Landu Leko Mulut Seribu dan Rote Ba'a-Ina'oe Nembrala.

Rute perintis tersebut merupakan penugasan dari Kemenhub yang kontraknya dilakukan dengan BPTD Wilayah XIII Nusa Tenggara Timur, untuk wilayah-wilayah yang tidak ada angkutan umum. Namun ada juga sejumlah trayek yang tidak lagi dilayani Damri akibat keterbatasan kendaraan.

Selain di Cabang Kupang, di provinsi Nusa Tenggara Timur Damri juga beroperasi di Kabupaten Kefamenanu, Waingapu, dan Ende.

Dari trayek-trayek yang dilalui, sebagian rute ekstrim. Tanjakan dan turunannya sangat terjal dan curam. Kadang harus melalui sungai yang dalam dengan arus yang kencang. Namun faktor keselamatan, keamanan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama.

Pada trayek Kupang-Naikliu misalnya, banyak melewati tanjakan berbatu dan berlubang sehingga bus sering mengalami kerusakan, sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.

Pada saat musim hujan ada beberapa trayek yang sulit ditembus ke daerah tujuan masing-masing disebabkan meluapnya beberapa sungai besar di Pulau Timor. Pada rute Kupang-Manubelon misalnya, sedikitnya ada 10 sungai yang harus dilalui.

Trayek Kupang-Manubelon. Untuk jarak mungkin tidak terlalu jauh tapi waktu tempuhnya bisa 10 jam. Apalagi bila musim hujan bisa lebih lama lagi karena harus menunggu air surut yang memungkinkan bisa ditembus oleh bus.

Ada satu sungai yang pada saat musim kering hanya batu dan pasir saja. Tapi pada saat musim hujan, sopir bus akan berpikir 1000 kali untuk menembusnya. Namanya Kali Ta'en. Kali adalah

sebutan bagi sungai yang banyak airnya. Jika hanya bebatuan, pasir dan sedikit air warga setempat menyebutnya sungai.

Bukan hanya kedalamannya yang bisa mencapai 2 meter tapi lebarnya itu, lebih dari 800 meter. Bayangkan sungai dengan lebar 800 meter dengan kedalaman air 2 meter.

Jika air terlihat sudah mulai surut, maka sopir dan penumpang akan memeriksa kedalamannya. Jika kedalaman sudah +- 50 cm, sopir berani melanjutkan perjalanan, namun jika air masih tinggi maka sopir, bus dan penumpangnya terpaksa bermalam di perjalanan.

Adalagi Kali Simolo. Lebarnya hanya 100 meter. Ada juga Kali Termanu, meski tidak terlalu dalam tapi arusnya deras. Kendati kedalaman air hanya 75 centimeter, tapi jika dilintasi kendaraan mobil *pickup* bisa hanyut. Bus yang memiliki bobot 3,8 ton masih bisa melintas tapi harus perlahan dan menjaga keseimbangan.

Jika jalan tidak bisa ditembus, maka bus, sopir dan penumpang harus menginap di perjalanan. Dalam kondisi seperti itu sopir hanya bisa pasrah. Tidak bisa lapor ke kantor karena rute yang dilalui tidak ada sinyal. Jangankan sinyal, listrik pun belum masuk.

Hal itu dialami sendiri oleh Tim Info Hubdat. Saat akan melakukan wawancara dengan pengemudi bus rute Kupang-Manubelon kami kehilangan kontak. Daerah di mana sopir berada tidak ada sinyal. Kami mencoba menghubungi kantor cabang Kupang untuk mendapatkan informasi. Giliran kami yang tidak dapat sinyal. Untuk mendapatkan sinyal kami



Kantor Damri Cabang Kupang

harus bergeser ke salah satu bukit. Baru dapat.

Masalah belum selesai. Kami kehabisan daya baterai di ponsel. Kami mampir ke sebuah warung yang menjadi tempat pemberhentian bus, tempat sopir dan penumpang sarapan atau sekedar minum kopi. Lokasinya di Desa Poto Kecamatan Barate Kabupaten Kupang. Sekitar 3 jam perjalanan dari kota Kupang.

Kami lihat ada bohlam lampu bergayut. Sayapun bertanya kepada Mamak pemilik warung, dimana colokan untuk nge-charge ponsel. Beliau menjawab, "Di daerah ini belum ada listrik. Kami menggunakan diesel dan hanya dihidupkan malam hari saja," jelasnya.

Beberapa rute lain tidak kalah ekstrimnya. Masih banyak jalan-jalan di wilayah NTT yang tidak beraspal, masih bebatuan, berlubang dan berlumpur. "Tapi Damri harus tetap jalan melayani sebagai bentuk negara hadir di tengah masyarakat," kata GM Damri Cabang Kupang, Ruslan saat ditemui Tim Info Hubdat di kantornya.

Kendala lain adalah kondisi bus yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan berat. Damri Cabang Kupang memiliki 18 buah bus. Tapi busnya sudah tergolong tua, apalagi untuk melayani medan yang ekstrim. Bus termuda yang dioperasikan buatan tahun 2018 bantuan Kementerian

Perhubungan yang digunakan untuk angkutan Bandara El Tari. Bahkan ada bus tahun pembuatan 2010. bus tahun-tahun sebelumnya sudah menjadi bangkai di samping kantor.

"Dengan kondisi bus yang seperti itu, sulit bagi Damri untuk memberikan pelayanan yang maksimal terutama dari segi kenyamanan dan keselamatan. Kami butuh armada yang baru, yang tangguh untuk melayani rute ekstrim," kata Ruslan.

Dari belasan rute perintis yang dilayani, trayek terjauh yang dilayani adalah Kota Kupang ke Oepoli (Kabupaten Kupang) yang merupakan daerah perbatasan dengan Timor Leste. Jarak tempuhnya sekitar 230 kilometer dengan waktu tempuh antara 10 sampai 12 jam, tergantung cuaca.

Mengapa jarak tempuh itu terkait dengan cuaca seperti saat-saat musim hujan mulai bulan November sampai Februari? Karena jalan yang ditempuh, selain melintasi sungai juga jalannya



General Manager Damri Cabang Kupang, Ruslan, di halaman kantornya.

turunan dan tanjakan ekstrem. Saat hujan, jalan yang belum sepenuhnya di aspal menjadi licin dan ini sangat membahayakan.

Kalau kondisinya tidak mungkin dilalui maka sopir yang sudah sangat paham daerah yang akan dilalui memilih untuk berhenti sambil menunggu cuaca membaik dan bus bisa kembali melanjutkan perjalanan.

Trayek Kupang-Oepoli berangkat jam 05.00 pagi. Hanya satu unit bus yang beroperasi. Begitu sampai Oepoli bus menginap di sana. Kembali ke Kupang keesokan harinya.

Dalam satu kali perjalanan, bus berkapasitas 19 penumpang hanya terisi 7 sampai 9 penumpang saja. Yang sampai Oepoli hanya 3-4 penumpang. Sisanya turun di jalan

Pada hari Senin, bus ke Oepoli lumayan banyak, pada Sabtu penumpang ke Kupang yang banyak. Penumpangnya adalah mereka yang bekerja di perbatasan.

Untuk jarak tempuh 230 kilometer tarifnya tergolong murah, hanya Rp 75.000. Selain Damri ada PO Lariska melayani rute yang sama dengan tarif Rp 100.000 untuk sekali jalan.

Ruslan menjelaskan, Damri Cabang Kupang memiliki sumber daya manusia 27 orang. Jumlah sopir 13 orang dan 1 koordinator. Tidak ada kernet. Sisanya teknisi dan bagian administrasi.

Dibandingkan dengan PO lain, Damri menjadi pilihan utama transportasi masyarakat Kupang. Selain karena melayani banyak rute Damri unggul dalam pelayanan dan banyak membantu masyarakat kecil.

Jika bus mogok ditengah jalan, tim teknisi langsung meluncur ke lokasi. Jika sopir melaporkan perbaikan tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat maka akan di kirim bus pengganti. "Jangan sampai penumpang kecewa karena perjalanannya terganggu," kata Ruslan.

Sopir Amanah, Sering Titip Uang dan Beras

Bus Damri juga seringkali menjadi andalan masyarakat kecil untuk menitipkan uang atau hasil ladang seperti beras, jagung, pisang dan sebagainya. Penitipan dilakukan oleh orang tua di daerah yang anaknya sekolah atau kuliah di Kupang.

Karena Damri belum menyediakan jasa ekspedisi maka titip uang atau barang ke pak sopir. Tidak ada biaya tertentu yang ditetapkan. "Paling kasih uang sekedar untuk beli rokok. Bahkan ada yg kasih siri pinang ke sopir," imbuhnya.

Uang dan barang bisa ambil langsung ke sopir yang sudah mereka kenal dengan baik. Tapi kalau sopirnya mau pergi narik lagi, akan dititip di kantor. Karena sopirnya amanah, selama ini tidak ada komplek dari masyarakat yang menitipkan uang atau barangnya ke sopir.

Tapi untuk titipan seperti Sepeda Motor, BBM atau barang dagangan, ada biaya serelanya yang uangnya masuk ke kantor.

Sementara itu Kepala BPTD Wilayah XIII Tito Gesit Utiarto mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba lintasan dari Bandara El Tari ke Timor Leste. Saat ini bus hanya melayani sampai Mota'Ain di Atambua.

Potensinya ada. Banyak masyarakat Timor Leste yang kepentingan ke Kupang untuk kepentingan bisnis atau keluarga. Karena masih banyak ikatan keluarga antara warga Kupang dan Timor Leste.

Layanan Damri perintis di Wilayah Kerja BPTD XIII hampir melayani seluruh kabupaten di kepulauan. Namun masih banyak daerah atau pelosok yang belum terlayani karena keterbatasan kendaraan. (Tim infoHUBDAT)(*)



Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mobilitas masyarakat di wilayah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Damri akan hadir melayani dua rute, yaitu dari Kota Ba'a ke Inaoe dan dari Kota Ba'a ke Landu Leko.

Dipilihnya rute Kota Ba'a yang merupakan Ibukota Kabupaten Rote Ndao ke Landu Leko dengan jarak tempuh sekitar 60 km atau sekitar 2 jam perjalanan, karena di Landu Leko ada tempat pariwisata yaitu pantai Mulut Seribu.

Sedangkan rute Kota Ba'a ke Inaoe dengan jarak tempuh 27 Km dipilih karena di daerah tersebut tidak ada angkutan umum. Padahal di Inaoe juga ada tempat pariwisata yang tidak kalah menariknya yaitu Pantai Nemberala. Waktu tempuhnya sekitar 45 menit.

Sayangnya untuk saat ini Damri tidak bisa menjangkau pantai Nemberala yang jaraknya sekitar 3 km dari pemberhentian terakhir di Inaoe, karena jalan yang ekstrim yaitu tanjakan dan turunan yang sangat tajam, sehingga sulit di tempuh oleh Damri karena berbahaya bagi keselamatan bus dan penumpangnya.

General Manager DAMRI Cabang Kupang, Ruslan yang di dampingi Manager Usaha Abu Zaman telah bertemu dengan Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu. Rencananya Paulina sendiri yang akan meresmikan pembukaan rute perintis tersebut.

Nantinya, Damri akan menggunakan dua unit bus untuk melayani dua rute tersebut dengan armada bantuan Kemenhub tahun 2016 yang dioperasikan secara pergi pulang.

Untuk rute Kota Ba'a - Landu Leko, perjalanan diawali dari Kota Ba'a dengan maksud agar



Perahu wisata melintas di perairan Mulut Seribu, Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Foto: medcom.id

RUTE ANGKUTAN PERINTIS BARU UNTUK DUKUNG PARIWISATA PULAU ROTE

Rute Kota Ba'a - Inaoe, atas permintaan ibu Bupati dan masukan dari kepala dusun akan diawali dari Inaoe. "Tujuannya agar dapat mengangkut hasil bumi masyarakat setempat dan mengangkut anak-anak sekolah," jelas Ruslan.

masyarakat atau wisatawan dapat menuju tempat pariwisata

dan kembali lagi ke Kota Ba'a menjelang sore.

bumi masyarakat setempat dan mengangkut anak-anak sekolah," jelas Ruslan.

Saat melakukan survei untuk Damri perintis di Pulau Rote, Ruslan menemukan anak-anak menuju sekolah dengan berjalan kaki. Padahal jarak dari rumah ke sekolah sekitar 6-7 kilometer.

"Inilah yang melatarbelakangi mengapa Damri membuka rute ini. Damri dan pemerintah harus hadir di tengah kesulitan masyarakat," kata Ruslan.

Menurut Abu Zaman, karena ini rute perintis dan ada subsidi dari pemerintah pusat, Damri memperkirakan, tarif Ba'a - Landu Leko sekitar Rp 25.000 dan Ba'a - Inaoe Rp 15.000. Adapun tarif untuk anak sekolah Rp 1000," kata Abu.

Mengenai kepastian tarifnya, masih akan dibicarakan lebih

lanjut antara Pemda Rote Ndao dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XIII Nusa Tenggara Timur.

Selama ini, masyarakat dan wisatawan kesulitan mendapatkan transportasi yang terjangkau. Kalaupun ada, harus carter dengan harga yang lumayan mahal yaitu Rp 500.000 dari Ba'a ke Landu Leko pp. Selain tidak ada alternatif, di Rote sulit mendapatkan bahan bakar minyak.

Sebelumnya, pada Juli 2021, Damri juga membuka rute uji coba dari Bandara El Tari ke Pos Lintas Batas Negara di Mota'ain melalui Atambua dengan jarak tempuh sekitar 350 kilometer.

Layanan tersebut dihadirkan Damri mengingat masih minimnya transportasi penunjang mobilitas kawasan Kupang tersebut.

Dikarenakan bus yang melayani rute tersebut mengalami kerusakan dan Damri Cabang Kupang mengalami keterbatasan unit, rute uji coba El Tari - Mota'ain akhirnya dihentikan sementara pada awal Desember 2021. (*)

Sedangkan rute Kota Ba'a - Inaoe, atas permintaan ibu Bupati dan masukan dari kepala dusun akan diawali dari Inaoe. "Tujuannya agar dapat mengangkut hasil



Penyeberangan Perintis di Nusa Tenggara Timur

Pelabuhan Bolok merupakan pelabuhan penyeberangan yang paling sibuk di Pulau Timor. Dari pelabuhan ini kapal-kapal penyeberangan berlayar menyebar ke sejumlah wilayah kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BPTD XIII NUSA TENGGARA TIMUR

Selain Pelabuhan Penyeberangan Bolok, ada lagi Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi di Pulau Alor dan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo di Pulau Komodo. Semuanya dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Ketiga pelabuhan penyeberangan ini dibawah pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XIII Nusa Tenggara Timur.

Selain tiga pelabuhan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry, BPTD Wilayah XIII juga melakukan pengawasan dengan menempatkan personil satker di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan yang dikelola Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Kepemilikan aset pelabuhan penyeberangan itu pun beragam. Ada yang tanah dan bangunannya milik Ditjen Perhubungan Darat, ada yang aset dan bangunannya dimiliki pemerintah daerah, tapi ada juga aset tanahnya milik pemerintah daerah tapi bangunannya milik Ditjen Perhubungan Darat.

General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ardhi Ekapaty menjelaskan, khusus di cabang kupang ada 14 kapal ASDP yang melayani 53 lintasan di sejumlah kabupaten di NTT. Selain ASDP ada perusahaan lain yaitu swasta murni PT Garda Maritim yang memiliki 2 kapal dan BUMD yaitu PT Lobamor juga dengan 2 kapal.

Kapal-kapal ini kelaiklautannya di bawah pengawasan BPTD. Juga pelaksanaan *docking* kapal harus dilaporkan ke BPTD supaya tidak mengganggu ketersediaan kapal dan operasional pelayaran.

Pada bulan Januari sampai dengan Maret biasanya cuaca ekstrem melanda laut Timor. Informasi cuaca selalu disampaikan BMKG wilayah Kupang. Pada saat cuaca tidak bersahabat, biasanya sebagian kapal melakukan *docking*. Sehingga pada saat gelombang kembali tenang,



Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

kapal-kapal sudah prima dan siap kembali melayani penumpang.

Untuk lokasi doking kapal tergantung kondisinya. Jika *service* minor atau perawatan saja cukup di Lembar atau Makassar. Jika harus *overhaul* akan dilakukan di Surabaya karena peralatan baru dan suku cadangnya lebih lengkap.

PT ASDP Cabang Kupang saat ini melayani 12 lintasan komersial dan sisanya perintis. ASDP juga baru saja membuka pelayaran baru di Pulau Alor dari pelabuhan Kalabahi ke pulau Kura dan Teluk Gurita yang diresmikan oleh Bupati Alor.

Ardhi menambahkan, dari 55 lintasan yang dilayani, hanya ada 9 kapal yang eksis melayani rute perintis karena selebihnya melayani rute komersial. Akibat dari keterbatasan kapal maka pemeliharaan pun dilakukan sambil jalan.

Bahkan ada kapal yang sebulan sekali baru kembali ke *homebase*-nya di Bolok yaitu KMP Gilimandiri. Kapal ini melayani rute : Kupang - Larantuka - Pulau Solor - Lewoleba - Deri, kembali lagi ke Kupang. "Kapal ini nakal, mainnya jauh. Pulangnya sebulan sekali. Kadang kami kangen juga sama *crew*-nya," kata Ardhi berseloroh.

Menurut Ardhi untuk melayani 55 lintasan sedikitnya perlu sekitar 15 sampai 20 kapal yang *homebase*-nya tersebar.

Kepala BPTD Wilayah XIII Tito Gesit sependapat dengan Ardhi. Pihaknya sudah pernah mengajukan tambahan kapal ke pusat. Pengadaan kapal dapat dilakukan

langsung oleh Ditjen Perhubungan Darat atau melalui BPTD wilayah XIII.

"Apabila ada kapal yang melayani rute perintis mengalami kerusakan atau harus *docking*, kami tidak mungkin menggeser kapal ke rute tersebut, karena jumlah kapalnya juga terbatas" jelas Tito.

Rute perintis adalah rute yang sebagian harga tiketnya disubsidi atau ditanggung pemerintah. Oleh karenanya rute-rute perintis biasanya ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Masyarakat sanggup kok beli tiket. Bukan sekedar pulang kampung tapi juga pebisnis. Mereka masih mampu dan tidak ada masalah dengan tarif yang ditentukan Kemenhub.

Untuk menopang biaya operasional, biasanya perusahaan pelayaran menyubsidi silang pendapatannya dari rute-rute komersial. "Tapi tarif komersial yang berlaku sekarang sudah 5 tahun tidak mengalami penyesuaian," pungkas Ardhi. (Tim InfoHUB-DAT)





Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Mandalika MotoGP 2022. Foto: motogp.com

Secara bertahap kami di Ditjen Hubdat memberikan beberapa dukungan baik berupa fasilitas keselamatan, juga transportasinya. Pertama dukungan *shuttle bus* dengan anggaran 5,4 Miliar dengan kebutuhan 287 unit dimana 85 unit bus dari Kemenhub dan 202 unit dari ITDC untuk *shuttle bus* di kawasan Mandalika. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam *Media Briefing* "Dukungan Sektor Transportasi Pada Event MotoGP Mandalika 2022" pada Rabu (16/02).

Dalam keterangan tersebut, Dirjen Budi menjelaskan bahwa jenis *shuttle bus* yang disediakan adalah kategori sedang. "Headway kami pertahankan tidak lebih dari 5 menit," jelasnya.

Jumlah bus tersebut telah disesuaikan untuk mengangkut penumpang sebanyak 63 ribu orang dan dapat digunakan secara gratis.

Sementara itu akan ada dukungan berupa bus antarmoda untuk melayani angkutan antarmoda di 6 rute yang menghubungkan pusat kota dan simpul transportasi di luar kawasan sirkuit.

"Untuk bus antarmoda kami siapkan 278 bus (27 bus besar, 70 bus sedang, 181 bus kecil).

DUKUNGAN SEKTOR TRANSPORTASI DARAT PADA MOTOGP 2022

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyiapkan dukungan untuk perhelatan MotoGP senilai total Rp 21,2 Miliar.

Nantinya semua pergerakan penumpang baik di dalam kawasan maupun di luar akan menggunakan angkutan yang disediakan," jelas Dirjen Budi. Lebih lanjut untuk pembangunan fasilitas pendukung integrasi moda telah disiapkan tambahan 4 unit halte yaitu pada Parkir Timur, Gate 1, Gate 2, dan Gate 3. Sebelumnya telah ada 1 halte eksisting di Parkir Barat. "Kemudian juga dilakukan pembangunan perlengkapan jalan dan bantuan teknis pembangunan perlengkapan jalan di Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika," tambahnya.

Pelayanan Angkutan Antarmoda disediakan sebanyak 6 rute yaitu: Sirkuit Mandalika - Pelabuhan Bangsal; Sirkuit Mandalika - Pusat kota Mataram; Sirkuit Mandalika - Pelabuhan Lembar; Sirkuit Mandalika - Pelabuhan Gilimas; Sirkuit Mandalika - Bandara Bizam; Sirkuit Mandalika - Pelabuhan Kahyangan.

Tidak hanya itu, Ditjen Hubdat juga mempersiapkan sebuah skema Manajemen Rekayasa Lalu lintas (MRL). "Dengan peningkatan kendaraan dan banyaknya masyarakat tentunya akan banyak kendaraan yang

PELAYANAN ANGKUTAN SHUTTLE MOTOGP MANDALIKA 2022



No. Rute	Rute	Warna Rute	Headway (Menit)	RTT	Jumlah Bus	Jenis Bus
1	Dari Parkir Barat (PB) ke Gate 3 (G3)	Merah	1 - 5	27	19	Bus Sedang
2	Dari Parkir Barat (PB) ke Gate 1 (G1)/(PS)	Orange	1 - 5	34	30	Bus Sedang
3	Dari Parkir Barat (PB) ke Gate 2 (G2)	Pink	1 - 5	44	30	Bus Sedang
4	Dari Parkir Timur (PT) ke Gate 3 (G3)	Hijau	1 - 5	40	34	Bus Sedang
5	Dari Parkir Timur (PT) ke Gate 1 (G1)/(PS)	Coklat	1 - 5	32	29	Bus Sedang
6	Dari Parkir Timur (PT) ke Gate 2 (G2)	Biru	1 - 5	29	26	Bus Sedang
7	Dari Gate 3 (G3) ke Gate 2 (G2)	Kuning	1 - 5	34	16	Bus Sedang

memicu kemacetan. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Kepolisian akan menyiapkan MRLL sehingga diharapkan kelancaran akan terjamin dan mengatur pergerakan kendaraan dari satu titik ke titik lain," jabar Dirjen Budi.

"Untuk mendukung transportasi dari beberapa pulau, kami sudah menyiapkan angkutan eksisting dari Pelabuhan Padangbai ke Lembar menggunakan angkutan penyeberangan, jaraknya sekitar 38 Nm (Nautical mile), kita sudah ada kapal feri yang eksisting.

Dukungan berupa bus antarmoda untuk melayani angkutan antarmoda di 6 rute yang menghubungkan pusat kota dan simpul transportasi di luar kawasan sirkuit.

Selanjutnya kami menyiapkan Long Distance Ferry (LDF) Surabaya-Lembar dan LDF Ketapang-Lembar," tambahnya. Dari lintasan Padangbai-Lembar dapat melayani 15.700 penumpang, masing-masing dilayani oleh kapal feri sebanyak 9.700 penumpang dan kapal cepat sebanyak 6.000 penumpang. Sementara lintas Kayangan-Pototano mampu melayani 4.140 penumpang dengan kapal feri sebanyak 2.700 penumpang dan kapal cepat 1.400 penumpang.*)





PASTIKAN KESIAPAN SEKTOR TRANSPORTASI DARAT PADA MOTOGP 2022

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan event MotoGP 2022 yang digelar pada 18 hingga 20 Maret 2022, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memastikan kesiapan sektor transportasi darat di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).



Hal itu diwujudkan dengan menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta manajemen moda transportasi untuk mendukung pelaksanaan event MotoGP 2022 di Mandalika, Selasa (15/3).

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa saat ini Indonesia masih dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19. Karena itu, walaupun antusiasme masyarakat tinggi, penyelenggaraan MotoGP 2022 harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin, baik bagi para atlet maupun *official crew* dan para penonton.

Langkah-langkah yang telah disiapkan, antara lain, persiapan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta manajemen moda transportasi yang dikoordinasikan oleh Polri dan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. "Nanti juga dibantu oleh *stakeholder* terkait yang saling bersinergi dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan acara MotoGP 2022 yang selamat, aman, tertib, dan nyaman," jelas Dirjen Budi.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain,

memastikan waktu operasional dan rute untuk angkutan sewa khusus, angkutan sewa umum, dan taksi yang bisa masuk ke dalam kawasan Mandalika; memastikan ketersediaan bus antarmoda pada simpul transportasi (saat berangkat) dan parkir barat serta gate 2 (saat pulang) sesuai kebutuhan penonton pada saat jam sibuk sehingga tidak terjadi kerumunan. Lalu, memastikan bus antarmoda sudah terparkir di area parkir barat dan area parkir timur untuk mengantisipasi kepulungan penonton setelah selesai menyaksikan pertandingan balap,



Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta manajemen moda transportasi untuk mendukung pelaksanaan event MotoGP 2022 di Mandalika, Selasa (15/3/2022). Foto: WBW



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi memastikan kesiapan dukungan bus dari Kementerian Perhubungan pada MotoGP 2022 (15/3/2022). Foto: WBW

memastikan kapasitas area parkir di sekitar gate 2 karena akan terjadi konflik pertemuan bus *shuttle* dan bus antarmoda, mekanisme pemisahan penumpang di hub eks Bandara Selaparang dan hub Embarkasi Haji BIZAM menuju parkir barat dan parkir timur.

Kemudian, penempatan petugas untuk pengendalian lalu lintas di persimpangan yang dilalui oleh rute bus antarmoda, terutama pada jam sibuk dan lokasi potensi rawan macet. Di hub eks Bandara Selaparang dan hub eks Embarkasi Haji BIZAM, perlu petugas yang memadai untuk mengatur penonton saat naik dan turun serta masuk dan keluar bus antarmoda agar kedatangan dan keberangkatan sesuai waktu *headway* yang sudah ditentukan.

"Untuk di pos penyekatan, petugas perlu membuat skema pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas untuk kendaraan yang

diizinkan melintas dan kendaraan yang dilakukan pembatasan agar tidak menyebabkan kemacetan atau perlambatan kendaraan," urai Dirjen Budi.

Dalam rapat tersebut, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto selaku Komandan Lapangan MotoGP 2022 mengatakan, "Pada dasarnya keberhasilan pergelaran MotoGP 2022 ini dapat terjadi berkat dukungan dari seluruh pihak yang terlibat."

Dirjen Budi berharap berbagai dukungan yang telah dilakukan pemerintah dapat menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap dan mampu menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan MotoGP 2022 ini. (*)



Telah disiapkan tambahan 4 unit halte yaitu pada Parkir Timur, Gate 1, Gate 2, dan Gate 3. Sebelumnya telah ada 1 halte eksisting di Parkir Barat. Foto: HMS DJPD/WBW



ANGKUTAN PERKOTAAN DI KAWASAN MEBIDANG

Pembangunan transportasi perkotaan akan memperkuat infrastruktur yang nantinya membantu mengembangkan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar.



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Walikota Medan Booby Nasution berdiskusi pada saat penandatanganan nota kesepakatan mengenai Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Mebidang, Medan, 12/01/2022. Foto: BPTD Sumatera Utara

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan penandatanganan nota kesepakatan mengenai Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/ *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Kesepakatan ini dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Rumah

Jabatan Gubernur Sumatera Utara, Rabu (12/01).

“Untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan BRT di kawasan perkotaan Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang), maka dirasa perlu untuk membangun komitmen dan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan

ketersediaan angkutan massal berbasis jalan dalam memenuhi kebutuhan angkutan orang di Kawasan Mebidang,” ucap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

Untuk profil proyek BRT Medan yaitu tersedia koridor dengan 21 km jalur khusus yang terproteksi dari Terminal Pinang Baris ke Terminal Amplas. “Ada sebanyak 33 halte dengan jalur khusus dengan jarak rata-rata antar halte sekitar 600 meter dan 19 rute layanan langsung. Layanan BRT ini nantinya akan ada 19 rute layanan langsung yang menjangkau Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang. Jumlah bus yang ada rencananya sebanyak 440 unit dengan target penumpang sebanyak 153.000 per harinya. Kami targetkan BRT di Mebidang ini hadir pada tahun 2023,” kata Dirjen Budi.

Menurut Dirjen Budi, pembangunan transportasi perkotaan akan memperkuat infrastruktur yang nantinya membantu mengembangkan ekonomi dan pelayanan dasar.

Selain itu, sistem angkutan umum massal di Indonesia perlu dilakukan pengembangan agar dapat menjangkau perjalanan awal dan akhir sehingga transportasi publik yang berkelanjutan dan inklusif dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh kelompok masyarakat.

“Diharapkan lebih banyak masyarakat beralih ke moda transportasi publik. Kami berterima kasih atas disetujuinya nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang sebagai langkah awal dalam Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/ Bus Rapid Transit. Kami berharap melalui nota kesepakatan ini kita dapat

dengan optimal mengembangkan dan meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia,” jelas Dirjen Budi.

Lebih dalam lagi, ia mengatakan bahwa untuk biaya infrastruktur dan sistem BRT di Mebidang ini telah mendapat pinjaman pendanaan dari World Bank dan *Agence Francaise De Development* (AFD) sebesar Rp1,8 Triliun.

“BRT mendukung program pemerintah dengan mendukung terwujudnya kota Medan sebagai *The Kitchen of Asia* yang dilewati jalur BRT serta mengurangi kemacetan sebagaimana harapan Pemkot Medan dan Pemprov Sumut,” kata Dirjen Budi.

Berdasarkan data hasil kajian, dengan kehadiran BRT di kawasan Mebidang tersebut, maka ekspektasinya yaitu dapat mengurangi emisi CO2 sebesar 29.240 ton pada tahun 2024, kemudian terjadi penurunan angka kecelakaan sampai 6%, serta mengurangi waktu perjalanan per rute sebesar 29%. BRT di Mebidang diproyeksikan

SPESIFIKASI BUS



Melayani penumpang hingga ke luar koridor BRT “*Direct Service*” - 7,7 meter

Kapasitas: 20 kursi, 1 kursi roda, maksimal 15 penumpang berdiri



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan penandatanganan nota kesepakatan pengembangan angkutan massal berbasis jalan/bus rapid transit di kawasan mebidang, medan (12/01/2022). Foto: Dit. Angkutan Jalan



Melayani penumpang di dalam koridor BRT - 12 meter

Kapasitas: 31 kursi, 1 kursi roda, maksimal 54 penumpang berdiri

dapat mengangkut penumpang sebanyak 14.323- 153.277 per harinya dan mampu menciptakan 1.870- 2.178 lapangan kerja baru sebagai kru BRT.

Turut hadir juga dalam kegiatan penandatanganan nota kesepakatan tersebut yakni Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Suharto, Walikota Medan Bobby Nasution, Walikota Binjai Amir Hamzah, dan Wakil Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar. (*)

SEMANGAT REVITALISASI TERMINAL TIPE A

Demi mengembalikan fungsi terminal serta meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum, Kementerian Perhubungan terus berupaya melakukan perbaikan salah satunya dengan melakukan revitalisasi atau perbaikan terminal bus.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi bersama rombongan Komisi V DPR RI melakukan tinjauan progres revitalisasi Terminal Tipe A Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat pada Kamis (10/2).

Dalam tinjauan tersebut, Dirjen Budi mengatakan, "Sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan dalam rangka mengembalikan fungsi terminal serta meningkatkan minat masyarakat bepergian menggunakan transportasi umum, Kementerian Perhubungan terus berupaya melakukan perbaikan salah satunya dengan melakukan revitalisasi atau perbaikan terminal bus".

Lanjutnya, Ia menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan untuk melakukan revitalisasi tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga investor swasta melalui konsep KPBU (Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha) untuk membangun pusat komersial.

"Adapun revitalisasi Terminal Tipe A Harjamukti Cirebon ini dikonsepsikan terminal *mixed used* dan akan dimanfaatkan juga sebagai pusat kegiatan masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya yang dapat mengakomodir berbagai kegiatan kemasyarakatan," jelas Dirjen Budi. Mendukung pernyataan tersebut, Ketua Tim Komisi V DPR RI H.M.

yanan yang lebih baik, kemudahan aksesibilitas, serta keamanan dan kenyamanan saat menggunakan transportasi. Ke depannya diharapkan juga Terminal Harjamukti ini dapat dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya untuk kegiatan positif".

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati menambahkan, "Mudah-mudahan Terminal lainnya baik Terminal Tipe C dapat terhubung dengan Terminal Tipe A yang ada. Semoga dengan adanya revitalisasi Terminal Harjamukti ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat Cirebon juga bagi warga di lintas Provinsi". Untuk diketahui, terminal ini menempati lahan seluas ± 3,7 Ha

Arwani Thomafi mengatakan, "Tujuan dari revitalisasi Terminal ini adalah masyarakat para pengguna transportasi mendapatkan pela-



dengan luas bangunan terminal ± 3.360 m² dibangun dengan menggunakan dana APBN.

Adapun progres revitalisasi Terminal Harjamukti pada tahun 2020 telah dilakukan Pekerjaan Persiapan Struktur Lantai I, Pekerjaan Arsitektur Lantai I, Pekerjaan MEP Lantai I, Pekerjaan *Landscape Area* Pengendalian Bus dan Pekerjaan *Signage* dengan pagu sebesar Rp. 20 miliar. Dilanjutkan di tahun 2021 melakukan Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur Lantai 2, Pekerjaan Arsitektur Lantai 2, Pekerjaan MEP Lantai 2, Pekerjaan *Landscape Area* Parkir Kendaraan Pribadi, Pengadaan dan Pemasangan Furnishing dengan anggaran sebesar Rp 29 miliar.

Revitalisasi Terminal Bus Tegal Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan revitalisasi Terminal Tipe A Tegal dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 32 miliar yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang direncana-

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan peletakan batu pertama proyek revitalisasi Terminal Tipe A Tegal, 7/3/2022. Foto: MAD



kan selesai di bulan Oktober 2022 mendatang.

"Pada prinsipnya pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Di mana sejak tahun 2018 sebanyak 125 Terminal Tipe A di Indonesia telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan yang selanjutnya dalam pengelolannya akan dilakukan revitalisasi untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi saat acara *Ground Breaking* Terminal Tipe A Tegal pada Senin (7/3).

Menurutnya saat sekarang ini pembangunan Terminal sudah berbeda dari era sebelumnya. "Dengan memakai skema *mixed use* dalam pemanfaatannya dapat bekerjasama dengan pihak swasta seperti yang telah dilakukan di Terminal Tipe A Tirtonadi Solo yakni membangun *Convention Center, Sport Center, Food Court*, maupun *Mal Pelayanan Publik* yang juga akan dilakukan di Terminal Tipe A Tegal ini," lanjutnya.

Sementara itu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Eko Agus Susanto dalam laporannya menuturkan, "Ditjen Perhubungan Darat pada masa pandemi Covid-19 tetap berkomitmen dan terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa terminal sejalan dengan program Menteri Perhubungan yaitu Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum." Melalui Gerakan ini, Kementerian Perhubungan mengajak masyarakat untuk mengutamakan penggunaan angkutan umum dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. "Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kembali minat menggunakan angkutan umum adalah dengan menyediakan pelayanan yang

maksimal khususnya di Terminal Tipe A Tegal ini," terang Eko.

Pada kesempatan ini, Eko berharap dengan adanya revitalisasi ini dapat memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik kepada pengguna jasa transportasi serta menciptakan kebangkitan ekonomi untuk masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya yang pada akhirnya mampu mempercepat program pemulihan ekonomi nasional.



Di samping itu, Dirjen Budi juga menyoroti "Sekolah Terminal" yang sejak lama terdapat di Terminal Tipe A Tegal. "Ada spot unik di Terminal Tipe A Tegal yakni terdapat sarana belajar Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sakila Kerti yang diperuntukkan bagi anak pedagang asongan maupun awak kendaraan yang mencari nafkah di terminal ini. Saya meminta agar nantinya disediakan tempat proses belajar mengajar yang nyaman," tutur Dirjen Budi.

Sekretaris Daerah Kota Tegal yang mewakili Wali Kota Tegal Johardi, mengungkapkan, "Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang telah memberikan perhatian khusus kepada Terminal Tipe A Tegal. Pada masanya, Terminal ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang melalui jalur Pantura menuju ke arah Barat dari Timur maupun ke arah Selatan menuju Purwokerto namun karena adanya pandemi dan dibangunnya tol di lintas Jawa mengakibatkan Terminal ini menjadi sepi." Di sisi lain, Johardi berharap besar dengan adanya revitalisasi ini dapat meningkatkan kembali minat masyarakat menggunakan angkutan umum. (*)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi dan Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspawati melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam rangka kerja sama pengoperasian *Local Port Services* (LPS) di pelabuhan penyeberangan. Acara ini digelar di Jakarta pada Jumat (18/3).

Dalam sambutannya, Dirjen Budi menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan suatu momentum untuk mengembalikan tugas dan fungsi pengoperasian LPS ke Kementerian Perhubungan yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan nama *Ship Traffic Control* (STC).

“Mulai dari tanggal 1 Mei 2021 lalu pengoperasian LPS telah dilaksanakan oleh Ditjen Hubdat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Kerja sama ini tujuannya adalah sebagai suatu komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan penyeberangan, khususnya Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Kata kuncinya adalah keselamatan dan keamanan,” ujar Dirjen Budi.

Untuk mengoptimalkan pengoperasian LPS di pelabuhan penyeberangan, Ditjen Hubdat melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan telah melakukan langkah – langkah seperti pengadaan dan pembangunan sistem dan peralatan LPS, penyusunan regulasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) serta peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) operator LPS.

Lebih lanjut Ia menuturkan, dalam rangka mempercepat



Suasana kapal saat sandar dan labuh di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon, 5/7/2021. Sumber: selatsunda.com

KESEPAKATAN PENGOPERASIAN LOCAL PORT SERVICES DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Kerja sama ini tujuannya adalah sebagai suatu komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan penyeberangan, khususnya Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

pengoperasian secara penuh oleh personil BPTD dan meningkatkan kualifikasi SDM, Ditjen Hubdat bekerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) pada Maret hingga awal April mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk menyelenggarakan diklat operator LPS yang pesertanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari masing-masing BPTD.

“Saya minta kepada para Kepala BPTD harus menyiapkan SDM. Tidak hanya menyangkut masalah kemampuan tapi juga masalah integritas. Terutama permasalahan pungutan liar atau pungli. Dan untuk PT. ASDP diharapkan momentum ini bisa menjadi semangat untuk memperbaiki pelayanan ke depan,” jelas Dirjen Budi. Ia juga menambahkan agar dalam proses transisi pengoperasian

LPS dari PT. ASDP ke Ditjen Hubdat akan ada pendampingan sampai seluruh SDM siap untuk melaksanakan operasional LPS secara mandiri.

Sementara itu, Ira Puspawati mengucapkan rasa terima kasihnya dan menilai kerja sama pengoperasian LPS ini adalah hal yang baik karena mengembalikan tugas dan fungsi ke tempat yang

seharusnya yaitu pada ranah regulator.

“Saya kira memang PT. ASDP kan lahir dari Kemenhub di mana sangat wajar jika operator pelabuhan, operator kapal, dan LPS-nya pun dikelola oleh Kemenhub. Intinya saya sangat senang kalau tujuannya semangat memperbaiki Indonesia bersama-sama,” pungkas Ira.

Ira juga mengatakan bahwa tim PT. ASDP akan melakukan pendampingan selama masa transisi pengoperasian LPS agar berjalan mulus dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, Ira berpesan untuk menjaga ruang serta peralatan operasional LPS sebaik mungkin merupakan suatu investasi.

Sehubungan dengan adanya kerja sama ini, pada acara yang sama dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemakaian Aset yang meliputi Ruang dan Peralatan operasional LPS antara Kepala BPTD dan General Manager (GM) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada 4 pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk.

Dalam acara ini turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Junaidi, Para Kepala BPTD di Wilayah VI Provinsi Lampung dan Bengkulu, Wilayah VIII Provinsi Banten, Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, dan Wilayah XIII Provinsi Bali dan NTB, serta Para GM PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Merak, Bakauheni, dan Ketapang.(*)



Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspawati melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam rangka kerja sama pengoperasian *Local Port Services* (LPS) di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta (18/3/2022). Foto: HMS DJPD/BYU

Berbagai upaya penanganan ODOL (*Over Dimension Over Loading*) terus menerus dilakukan, antara lain dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar *Focus Group Discussion* dalam rangka penanganan ODOL dengan melibatkan Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang, di Semarang, Selasa (7/3/2022).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan bahwa dalam penanganan ODOL tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat. "Kita semua sepakat, bahwa itu (ODOL) harus ditangani bersama," katanya. Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif sejumlah operator yang dengan kesadaran sendiri melakukan normalisasi kendaraannya.

Dirjen Budi melanjutkan, "Kemenhub bersama Polri sepakat akan lebih mengedepankan aspek edukasi, kampanye, dan sosialisasi dalam penanganan ODOL." Namun hal ini bukan berarti tidak ada penegakan hukum sama sekali. "Penegakan hukum tetap akan diterapkan, tapi kepada pelanggaran yang kebangetan sekali, misalnya muatan lebih dari 100%," ujarnya.

Dengan mempertimbangkan situasi perekonomian nasional di tengah pandemi yang belum usai, diberikan diskresi khusus pada kendaraan pengangkut sembako. "Memang ada arahan Pak Menteri, untuk komoditas sembako terutama, kita akan diskresi," kata Dirjen Budi.

Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, yang bergabung dalam kegiatan tersebut secara virtual, mengatakan bahwa dalam penanganan ODOL, Polri juga mengedepankan langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan sosialisasi. "Penegakan hukum adalah pilihan terakhir yang dilakukan, semata-mata demi keselamatan. Baik keselamatan pengemudi itu sendiri



Focus Group Discussion Dalam Rangka Penanganan Over Dimension Over Loading (ODOL) dengan Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang, Semarang (7/3/2022). Foto: HMS DJPD/MAD

LALU LINTAS

AUDIENSI DENGAN PENGEMUDI TRUK DALAM RANGKA PENANGANAN ODOL

maupun pengguna jalan yang lain," katanya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryonugroho, menjelaskan, bahwa dari konsekuensi hukum terdapat perbedaan antara *Over Dimension* dan *Overload*. "Pelanggaran *over* dimensi adalah kejahatan, oleh karena itu seharusnya bukan ditilang tetapi akan dilakukan penyidikan. Sasarannya adalah pemilik kendaraan dan juga bengkel karoseri yang memodifikasi kendaraan tersebut. Pengemudi tidak dilibatkan," jelasnya. Sedangkan pelanggaran *overload* adalah tindak pidana ringan yang apabila kedapatan melanggar akan ditilang atau pun tindakan hukum lain seperti keharusan untuk melakukan transfer muatan yang biayanya dibebankan kepada pengemudi/ pihak pengangkut.

Kebijakan Bebas ODOL, sejatinya telah digagas sejak tahun 2018, namun pada waktu itu muncul aspirasi permintaan dari 14 asosiasi logistik antara lain asosiasi semen, pupuk, minuman ringan, dsb, yang kemudian disepakati untuk ditunda hingga 2023.

Kegiatan audiensi tersebut dihadiri oleh sejumlah asosiasi, antara lain Asosiasi Pengemudi Nasional, Aliansi Pengemudi Independen, Persatuan Sopir Truk Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, Himpunan Profesi Pengemudi Indonesia, Aptrindo, dan lain-lain. Dalam pertemuan tersebut pihak Kemenhub dan Polri mendengarkan suara dan keluhan para pengemudi truk. Dirjen Budi mengatakan, "Aspirasi dari pertemuan hari ini akan menjadi dasar untuk disampaikan ke Komisi V DPR RI sebagai usulan substansi revisi Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan." Tahun ini sudah dimulai pembahasan terhadap revisi regulasi tersebut.

Hadir pula pada kegiatan tersebut Kadishub Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro; Direktur Angkutan Jalan, Suharto; Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan; Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah; Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Junaedi; pengamat transportasi Djoko Setijowarno, serta pejabat terkait lainnya.*

ANGKUTAN

PROGRAM BTS TEMAN BUS AKTIF BEROPERASI KEMBALI



Trans Metro Dewata saat berada di area GOR Ngurah Rai Denpasar/ Frans Gandhi / Pikiran Rakyat

Setelah sempat vakum beroperasi selama beberapa waktu sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menjelaskan bahwa program Buy The Service (BTS) Teman Bus akan beroperasi kembali.

"Kami perlu menjelaskan mengenai penghentian sementara operasional BTS di 5 kota besar yang lelangnya tahun 2021 akhir. Proyek BTS sudah dilakukan semenjak tahun 2020 dan ada penambahan kembali di 2021

sebanyak 5 kota besar. Jadi sudah sekitar 10 kota besar yang disediakan oleh Kemenhub berupa pembenahan angkutan massal perkotaan. Dari 5 kota besar yang awal (tahun 2020) tidak ada masalah karena skemanya sudah *multi years contract* namun untuk yang tahun 2021 ada perubahan penyesuaian skema lelangnya. Dari yang tadinya lelang umum menjadi lelang e-katalog. Dan untuk lelang e-katalog perlu ada justifikasi penyesuaian beberapa persyaratan yang

ANGKUTAN

TINGKATKAN PROKES DI SIMPUL TRANSPORTASI, KEMENHUB BAGIKAN 10.000 PAKET HEALTHY KIT GRATIS



Dalam rangka meningkatkan penerapan protokol kesehatan di simpul-simpul transportasi, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Enesis Group melaksanakan pembagian sebanyak 10.000 paket *healthy kit* gratis yang tersebar di 8 (delapan) simpul transportasi pada Rabu (05/01) hari ini secara simbolis dibagikan di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi yang hadir secara lang-

sung mengatakan Kementerian Perhubungan telah bekerjasama dengan Enesis Group yang memproduksi minuman kesehatan dan produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*) terkait paket *healthy kit* atau paket kesehatan untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang ingin bepergian menggunakan transportasi massal.

"Menyangkut masalah protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang belum usai ini, jangan sampai kita lalai dan abai tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Berkaitan dengan ini sebelum pelaksanaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 kemarin, kami (Kemenhub) dengan Enesis Group sudah berdiskusi dan sepakat untuk tetap memberikan edukasi dan mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat salah satunya melalui paket *healthy kit* ini," tutur Dirjen Budi.

Adapun paket *healthy kit* ini dibagikan di 8 (delapan) simpul transportasi yang di antaranya Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ketapang, Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Terminal Pulo Gebang, Jembatan Timbang Balonggandu, Rest

ada sehingga sempat kami hentikan sementara," kata Dirjen Budi menjelaskan kronologis vakumnya pelayanan BTS Teman Bus di 5 kota selama beberapa waktu terakhir.

Hingga saat ini, *load factor* BTS di beberapa kota dinilai cukup bagus, terlebih di Banyumas maupun Makassar yang *load factor*-nya sering mencapai lebih dari 100% sehingga sering terjadi antrian penumpang yang antusias ingin mencoba BTS Teman Bus di kotanya masing-masing. Terlebih hingga kini layanan BTS Teman Bus masih dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.

"Nantinya diharapkan sebagian besar masyarakat akan *shifting* dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sehingga akan mereduksi kemacetan, kebisingan, efisiensi waktu, maupun kerugian ekonomi," tambah Dirjen Budi.

Senada dengan ungkapan Dirjen Budi, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat, Suharto menyatakan bahwa kehadiran BTS Teman Bus ini merupakan salah satu bentuk respon pemerintah pusat dalam mendorong transformasi angkutan perkotaan yang berkelanjutan.*

Area KM 72, dan Terminal Kampung Rambutan.

"Untuk penjabarannya khusus di Terminal Kampung Rambutan ini telah dibagikan sebanyak 2.000 paket. Mengingat pesan Menteri Perhubungan agar para awak kendaraan, operator, maupun calon penumpang untuk tetap menerapkan 5 M (Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi)," jelas Dirjen Budi.

Sementara itu, Dirjen Budi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi syarat perjalanan yang telah ditetapkan yaitu membawa hasil negatif *rapid test* antigen, bukti vaksin, serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat bepergian.

"Saya mengimbau kepada awak kendaraan maupun petugas di Terminal agar semakin meningkatkan pemeriksaan kesehatan bagi calon penumpang serta menjaga penerapan protokol kesehatan di Terminal maupun kendaraan," kata Dirjen Budi.*

LALU LINTAS

HINDARI KEMACETAN SAAT LIBUR NASIONAL, KAWASAN PUNCAK BERLAKU GANJIL-GENAP



Kementerian Perhubungan menegaskan kembali bahwa pelaksanaan ganjil genap di kawasan Puncak, Bogor tetap dilaksanakan pada Kami (03/03). Direktur Jenderal Perhubungan Darat sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Budi Setiyadi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian khususnya Polres Bogor.

“Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya kawasan Puncak, Bogor me-

ngalami kemacetan yang cukup lama pada periode libur panjang lalu. Pada hari ini juga merupakan libur nasional hari raya Nyepi, oleh karena itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak berlibur ke kawasan Puncak agar tidak terjadi kemacetan panjang. Selain itu di kawasan Puncak juga kami berlakukan kebijakan ganjil genap yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepolisian,” jelas Dirjen Budi.

Kebijakan ganjil-genap ini berlaku pada hari libur nasional maupun akhir pekan biasa seperti tertuang dalam PM 84 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak Nomor 074 dan Ruas Jalan Nasional Puncak-Batas Kota Cianjur Nomor 075.

Selain ganjil genap, Kemenhub juga menyiapkan opsi lain pengaturan lalu lintas di Puncak, seperti *contra flow* maupun buka tutup jalur. “Kebijakan ini telah kami bahas bersama dengan Kepolisian. Ketentuan kebijakan lainnya akan mengikuti diskresi dari Kepolisian atau situasional tergantung dari kondisi di lapangan,” katanya.

Dirjen Budi meminta agar masyarakat dapat mengantisipasi adanya lonjakan arus lalu lintas di sekitar wilayah Puncak pada hari libur nasional dan akhir pekan. Oleh karena itu, ia mengharapkan kerjasama semua pihak maupun masyarakat agar tidak berlibur ke Puncak untuk sementara waktu.

Sesuai hasil koordinasi dengan Satlantas Polres Bogor, diperoleh informasi bahwa hari ini juga perlu diantisipasi adanya kepadatan dari sekitar kawasan Puncak hingga jalur Cianjur karena perayaan keagamaan.

“Terkait pengaturan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas atau MRL di Puncak yang berlaku setiap hari libur maupun libur nasional telah berlaku ketentuan ganjil genap. Kami menganggap serius kejadian kemacetan panjang sebelumnya yang kerap terjadi di kawasan Puncak, oleh karena itu dalam waktu dekat kami akan mengundang Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan semua instansi terkait untuk membahas evaluasi MRL di Kawasan Puncak,” pungkas Dirjen Budi. (*)

KSLN

SIAP IMPLEMENTASIKAN SISTEM TRANSPORTASI CERDAS, KEMENHUB TEKEN NOTA KESEPAKATAN DENGAN KOREA



Kementerian Perhubungan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Infrastruktur, dan Transportasi Republik Korea (*Ministry of Land, Infrastructure, and Transport*) dalam sejumlah sektor pada Senin (21/03). Untuk sektor transportasi darat, digelar proses penandatanganan Memorandum of Agreement antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dengan Wakil Menteri Pertanian dan Infrastruktur Kementerian Pertanian, Infrastruktur, dan Transportasi Republik

Korea, Yun Seong-won yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi.

Dalam pertemuan bilateral ini, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebutkan dalam bidang transportasi antara Indonesia dan Korea telah terjalin hubungan bilateral yang intensif dan saling menguntungkan.

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyebutkan bahwa, “Seperti disampaikan oleh bapak Menteri Perhubungan bahwa untuk transportasi darat di Indonesia, saat ini menyangkut *Intelligent Transport System* (ITS) atau Sistem Transportasi Cerdas memang sangat penting di mana beberapa kota di Indonesia mengalami kemacetan,” jelas Dirjen Budi dalam acara tersebut.

Adapun kerjasama tersebut dalam sektor transportasi darat meliputi implementasi hibah dari Republik Korea pada proyek percontohan Pembangunan Sistem Transportasi Cerdas/ ITS dan Pengembangan Terminal Bus, serta Sistem Manajemen Informasi Bus (*Bus Information Management System/ BIMS*) di wilayah Jabodetabek.

Menurutnya dengan kehadiran ITS di Indonesia akan sangat membantu memecahkan persoalan transportasi dan lalu lintas di Indonesia. “Kemudian satu hal yang sedang kita dorong adalah menerapkan manajemen lalu lintas dengan menerapkan ITS, dan tahun 2021 kita sudah menerapkan suatu kajian, dan di 2022 diharapkan mulai menerapkan ITS di beberapa koridor di kota-kota besar di Indonesia. Skema ITS juga sudah kita integrasikan dengan bagaimana Indonesia berkomitmen membangun BTS untuk angkutan massal perkotaan,” jabarnya.

Dirjen Budi juga menyatakan apresiasinya atas kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak. “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Korea yang akan melakukan pengembangan terminal bus termasuk modifikasi dengan penambahan ITS untuk memudahkan kita melakukan manajemen di Terminal Tipe A. Indonesia saat ini di Kemenhub melalui Ditjen Hubdat sudah mengelola sebanyak 127 Terminal Tipe A di Indonesia. Sebagaimana arahan Menhub akan dilakukan revitalisasi juga meningkatkan pemanfaatan dan utilitasnya adalah salah satu yang diharapkan sebagai peran dari Pemerintah Korea,” urai Dirjen Budi. (*)

LALU LINTAS

PASCA INSIDEN CABUT BERKAS PAKSA, DITJEN HUBDAT TINGKATKAN KEAMANAN UPPKB BALONGGANDU



Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengonfirmasi adanya kejadian pencabutan berkas kendaraan secara paksa di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balonggandu, Karawang Jawa Barat, pada Kamis (03/03). Oleh karena itu, Ditjen Hubdat akan meningkatkan keamanan di lokasi tersebut. Hal ini juga diperlukan agar para petugas dapat bekerja secara optimal dalam pemeriksaan kendaraan yang masuk ke UPPKB Balonggandu.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, Denny Michels Adlan menyatakan bahwa kejadian berlangsung pada Kamis sore sekitar pukul 16.30 WIB dan terkam oleh CCTV yang berada di lokasi kejadian.

“Sebelumnya kami menggelar operasi gabungan keselamatan bersama Polres Karawang, Dishub Provinsi Jabar dan Dishub Kabupaten Karawang. Berdasarkan pemeriksaan di lapangan kendaraan tersebut ditemukan adanya Pelanggaran *Over Load* >30% dan harus dilakukan transfer muatan. Dari hasil pengukuran fisik kendaraan oleh Tim Penguji ditemukan pelanggaran *Over Dimensi*, maka sesuai peraturan Perundangan yang berlaku, kendaraan tersebut perlu ditunda perjalanannya. Muatannya harus dipindahkan dan pemilik kendaraan dipanggil untuk membuat komitmen normalisasi,” demikian dijelaskan oleh Denny.

Kemudian setelah operasi berakhir, 2 orang berseragam Brimob menyambangi UPPKB Balonggandu dan mengambil berkas pemeriksaan kendaraan yang sebelumnya sudah ditahan oleh petugas UPPKB Balonggandu. (*)

TSDP

ANTISIPASI ERUPSI GUNUNG ANAK KRAKATAU, DIRJEN HUBDAT IMBAU OPERATOR KAPAL UNTUK WASPADA



Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada beberapa hari terakhir mencuri banyak perhatian. Sebagai langkah antisipasi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi mengimbau para operator kapal untuk waspada. Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi Antisipasi Erupsi Gunung Anak Krakatau, pada Sabtu (5/2) malam.

“Diharapkan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayahnya segera memperingati operator kapal agar lebih waspada. Bukan hanya karena

LALU LINTAS

MITIGASI KECELAKAAN DI SIMPANG RAPAK



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menuturkan perlu adanya langkah mitigasi dalam menyikapi kejadian kecelakaan truk kontainer di Balikpapan pada Jumat (21/1). Hal ini disampaikan saat ia melakukan peninjauan langsung ke lokasi kecelakaan di Simpang Rapak, Minggu (23/1).

“Yang penting adalah mitigasi untuk penanganan selanjutnya seperti apa. Akan diadakan rapat koordinasi dengan Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR terkait dengan perubahan rekayasa yang akan dilakukan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendek yaitu dengan pembangunan jalur evakuasi sementara di sebelah kiri jalan dan jangka

erupsi, tapi juga karena cuaca yang sedang buruk,” ujar Dirjen Budi.

Selain itu, ia juga mengatakan perlunya penyiapan tempat-tempat perlindungan bagi kapal pada situasi darurat. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kapal akibat cuaca buruk.

“Nantinya informasi mengenai cuaca, gempa, maupun erupsi akan ditayangkan melalui Videotron yang telah dipasang oleh BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu & Lampung yang terletak di Pelabuhan Bakauheni,” tambah Dirjen Budi.

Di samping itu, Dirjen Budi juga meminta agar setiap institusi terkait dan *stakeholder* mempersiapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *Contingency Plan* dalam antisipasi terjadinya erupsi, gelombang tinggi, maupun tsunami.

Sebagai bentuk antisipasi lainnya, Sesditjen Perhubungan Darat, Marta Hadisarwono menyampaikan akan menugaskan para personil Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk bergabung bersama personil Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Vulkanologi di Pos Pantau Erupsi Gunung Anak Krakatau. (*)

panjang yaitu usulan pembangunan *fly over*,” ucap Dirjen Budi.

Lebih lanjut, Dirjen Budi mengatakan bahwa akan diadakan pembatasan operasional kendaraan barang yang akan dilakukan pada pukul 10 malam hingga 5 pagi yang mengacu pada peraturan Walikota Balikpapan.

“Kondisi jalan dengan elevasi kurang lebih 10% memang kurang baik untuk turunan panjang, maka, perlu dilakukan langkah mitigasi perbaikan seperti pembatasan operasional kendaraan angkutan barang,” jelas Dirjen Budi.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan bahwa telah ada hasil temuan sementara pada kendaraan truk kontainer yakni adanya perpanjangan ROH (*Rear Over Hang*) dan perubahan konfigurasi pada sumbu ban sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi asli kendaraan.

“Dari hasil temuan sementara, adanya tambahan ROH dan perubahan konfigurasi sumbu ban dari 1-1 menjadi 1-2-2 pada truk tersebut. Kami masih berkoordinasi dengan KNKT dan kepolisian karena penyebab pastinya masih dalam tahap investigasi,” ungkap Dirjen Budi. (*)



Petugas membuka bagasi bus sebelum berangkat, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Foto: merdeka.com/ Iqbal S. Nugroho

TERBITKAN SE 23/2022, KEMENHUB ATUR SYARAT BARU PERJALANAN DOMESTIK DENGAN TRANSPORTASI DARAT

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 23 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam rangka transisi menuju aktivitas normal, maka ada beberapa perubahan ketentuan mengenai upaya pencegahan Covid-19 khususnya pada transportasi di Indonesia.

"Melalui Inmedagri dan SE Kasatgas, hal ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa yang diterapkan angkutan umum maupun penyeberangan. Saya harap untuk segera disesuaikan, artinya dari sektor moda transportasi darat akan cepat menyesuaikan ketentuan ini," demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Selasa (8/3).

Kini para pelaku perjalanan dalam negeri dengan transportasi darat tak lagi diwajibkan membawa hasil tes antigen atau RT-PCR jika sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap atau dosis ketiga.

Sementara, pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

Jika para pelaku perjalanan mempunyai kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, maka wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari

Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

Bagi pelaku perjalanan dengan usia dibawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan. Demikian pula untuk moda transportasi perintis di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas dikecualikan serta berlaku sesuai dengan kondisi daerah masing-masing," tambah Dirjen Budi.

Khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang melakukan perjalanan dalam negeri wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib memiliki kartu vaksin dosis kedua atau dosis ketiga (booster), sedangkan yang hanya memiliki kartu vaksin dosis pertama wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan. Bagi pengemudi yang belum melakukan vaksinasi wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Sementara itu, khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang melakukan perjalanan dalam negeri luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun

waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dikecualikan syarat kartu vaksinasi.

Dalam SE 23 Tahun 2022 ini juga dituliskan bahwa untuk saat ini pembatasan kapasitas penumpang kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang, dan kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagai berikut:

1. jumlah penumpang paling banyak 70% dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing), untuk daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan Level 3; dan
2. jumlah penumpang paling banyak 100% dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing), untuk daerah dengan kategori PPKM Level 2 dan Level 1.

"Terkait dengan penanganan protokol kesehatan di setiap simpul transportasi, seluruh pelaku perjalanan dalam negeri masih tetap aktif dan wajib melaksanakan. Seperti penggunaan masker maupun handsanitizer, serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi," urai Dirjen Budi.

Bagi kapal angkutan penyeberangan yang akan melakukan perjalanan lintas pelabuhan antar wilayah yang menerapkan PPKM dengan level berbeda, maka pembatasan kapasitas penumpang mengikuti ketentuan pada wilayah yang menerapkan PPKM level tertinggi. Selain itu, awak kapal wajib melakukan sterilisasi kapal angkutan penyeberangan melalui penyemprotan disinfektan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi kapal yang melakukan pelayaran di wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 dan Level 1, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah debarkasi; atau
- b. bagi kapal yang melakukan pelayaran di wilayah yang menerapkan PPKM Level 3, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah debarkasi dan setiap 24 jam.

SE 23 Tahun 2022 ini mulai berlaku sejak 8 Maret 2022. Dalam pelaksanaannya, terkait koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta penyelenggara/operator prasarana transportasi darat.*



Kunjungan Menteri Perhubungan dan Konser Tulus di Tirtonadi, Terminal Bus Tirtonadi Solo, 8-9/1/2022. Foto: HMS DJPD/BYU - BPTD X Jateng DIY



Penandatanganan Nota Kesepakatan Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/ Bus Rapid Transit di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, dan Deli Serdang (12/1/2022).



▶ Menteri Perhubungan melakukan pelepasan kendaraan touring listrik Jakarta - Jambi dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Terminal Kampung Rambutan, 17/1/2022. Foto: HMS DJPD/WBW



▲ Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan normalisasi kendaraan truk yang over dimensi di Banyuwangi, Jawa Timur, 7/2/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



▲ Menkomarvest Luhut Panjaitan didampingi Menhub Budi Karya Sumadi mencoba sebuah motor listrik buatan Indonesia pada saat Peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di Jambi, 20/1/2022. Foto: HMS DJPD/MAD



◀ Penerapan Alat Timbang Weigh In Motion (WIM) dalam rangka Penertiban Kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) di Ruas Tol Cikopo - Palimanan, 10/2/2022. Foto: HMS DJPD/MAD



◀ Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, 6/2/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



◀ Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan normalisasi kendaraan angkutan barang yang over dimensi di PT Bakti Transindo, Tegal, Jawa Tengah, 7/3/2022. Foto: HMS DJPD/MAD



► Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama jajaran melakukan Rapat Koordinasi dengan Korlantas Polri, Jakarta, 14/3/2022. Foto: HMS DJPD/MAD



► Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Komandan Lapangan MotoGP Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto melakukan peninjauan kesiapan dukungan transportasi darat di Mandalika, NTB, 15/3/2022. Foto: HMS DJPD/WBW



► Kegiatan Penandatanganan Memorandum of Agreement antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dengan Wakil Menteri Pertanahan dan Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea, Yun Seong-won di Jakarta, 22/3/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

